

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENURUNAN KEMISKINAN DI INDONESIA**



**Disusun Oleh :**

**MAISANTI  
NIM : 180604067**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M / 1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Maisanti  
NIM : 180604067  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Juni 2023

Yang Menyatakan



Maisanti

# PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penurunan Kemiskinan di Indonesia

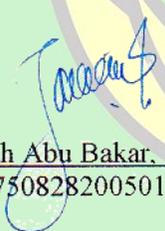
Disusun Oleh:

Maisanti  
NIM: 180604067

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Jariah Abu Bakar, SE., M.Si  
NIP. 197508282005012001

  
Jalilah, S.Hl., M.Ag  
NIDN. 2008068803

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y  
Mengetahui Ketua  
Program Studi Ilmu Ekonomi

  
Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 198307092014032002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Maisanti  
NIM : 180604067  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi  
E-mail : [180604067@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180604067@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi ..... (*tulis jenis ilmiah*)

yang berjudul:

**Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penurunan Kemiskinan di Indonesia**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 08 Juni 2023

Mengetahui

Penulis

Maisanti

NIM. 180604067

Pembimbing I

Dr. Jariah Abu Bakar, SE., M.Si

NIP. 197508282005012001

Pembimbing II

Jalilah, S.HI., M.Ag

NIDN. 2008068803

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang memberi rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian “*Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penurunan Kemiskinan di Indonesia*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. keluarga beserta sahabat beliau sekalian. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata-1 di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program studi Ilmu Ekonomi dan Ana Fitria, M.Sc selaku Sekretaris Program studi Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.
3. Hafiizh Maulana, SP., S.Hi., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bantuan, dukungan dan masukan yang penulis butuhkan selama ini.
4. Dr. Jariah Abu Bakar, SE., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Jalilah, S.Hi., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu

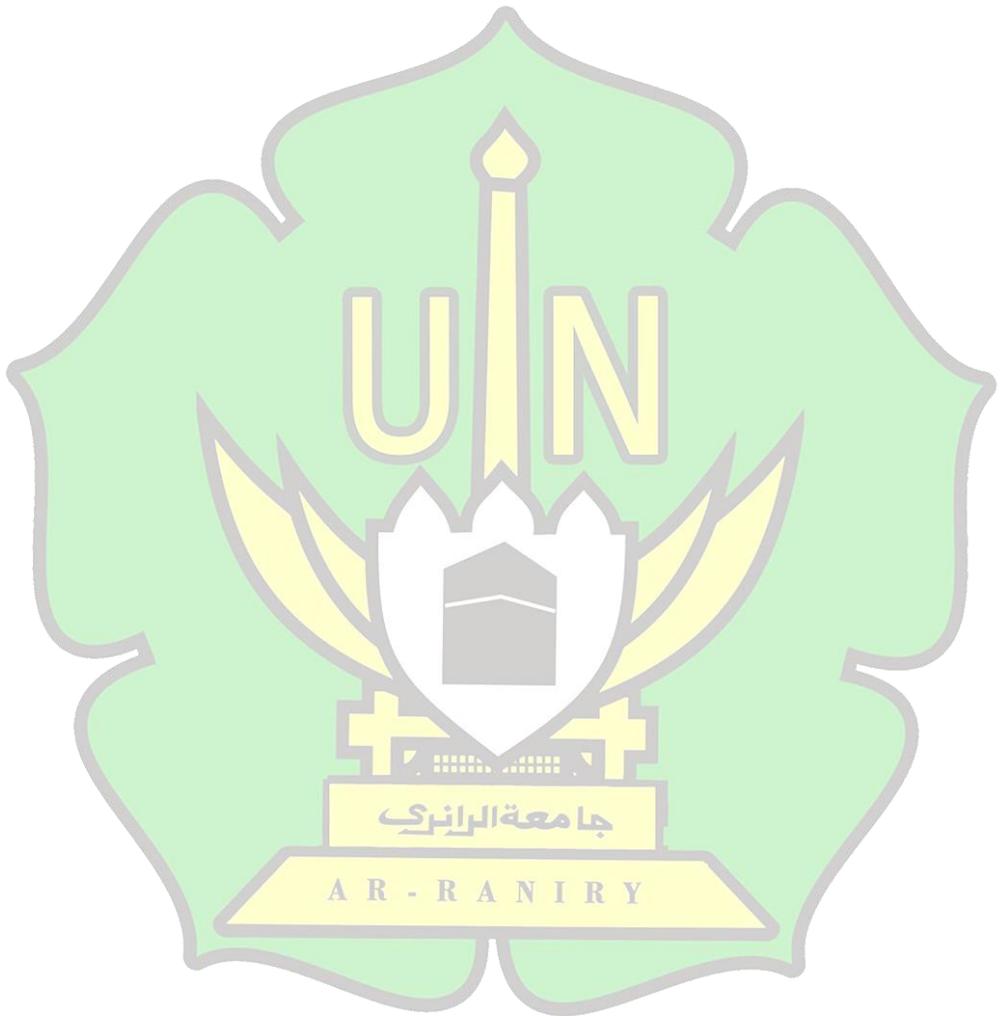
dan memberikan banyak masukan, kritik, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Khairul Amri, SE., M.Si selaku penguji I dan Rachmi Meutia, M.Sc selaku penguji II. Terima kasih telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Cut Elfida, MA selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing dan memberi semangat kepada penulis selama ini, serta seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan serta perhatiannya kepada penulis selama perkuliahan pada program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi.
7. Terima kasih yang teramat besar kepada Ayahanda M.ali dan Ibunda Naumiati tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan doa yang luar biasa yang tiada hentinya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. dan juga kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan selama ini.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat Fajar Rahmadi, Riski Bunaiya, Aisyah Ayudia Inara dimana telah memberikan dukungan besar serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik.
9. Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, inspirasi, doa, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran maupun kritikan yang bersifat konstruktif demi kelancaran skripsi ini.

Banda Aceh, 08 Juni 2023  
Penulis

Maisanti



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 –Nomor:0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak di lambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	”
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī

يُ	Dammah dan wau	Ū
----	----------------	---

Contoh:

- قَالَ : *qāla*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup  
 Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati  
 Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

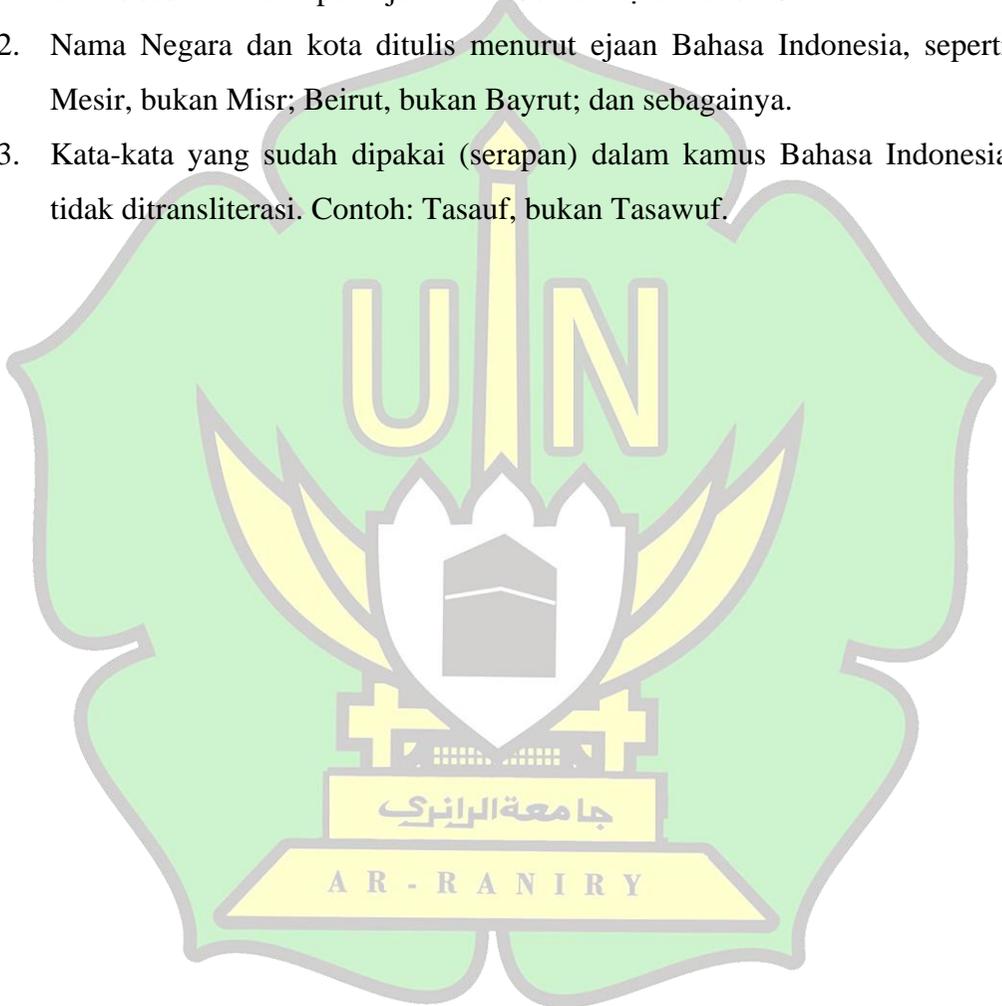
Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul  
 Munawwarah*  
 طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama : Maisanti  
NIM : 180604067  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi  
Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penurunan Kemiskinan di Indonesia  
Pembimbing I : Dr. Jariah Abu Bakar, SE., M.Si  
Pembimbing II : Jalilah, S.HI., M.Ag

Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang cukup besar, mengingat bahwa UMKM ini merupakan sektor yang paling memiliki kontribusi besar bagi perkembangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Adanya subsidi Umkm merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menurunkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh UMKM dan Subsidi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data *time series* dari tahun 1998-2021 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial UMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, sementara pengeluaran subsidi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, dan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan.

**Kata Kunci** : *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Subsidi, dan Kemiskinan.*

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

## DAFTAR ISI

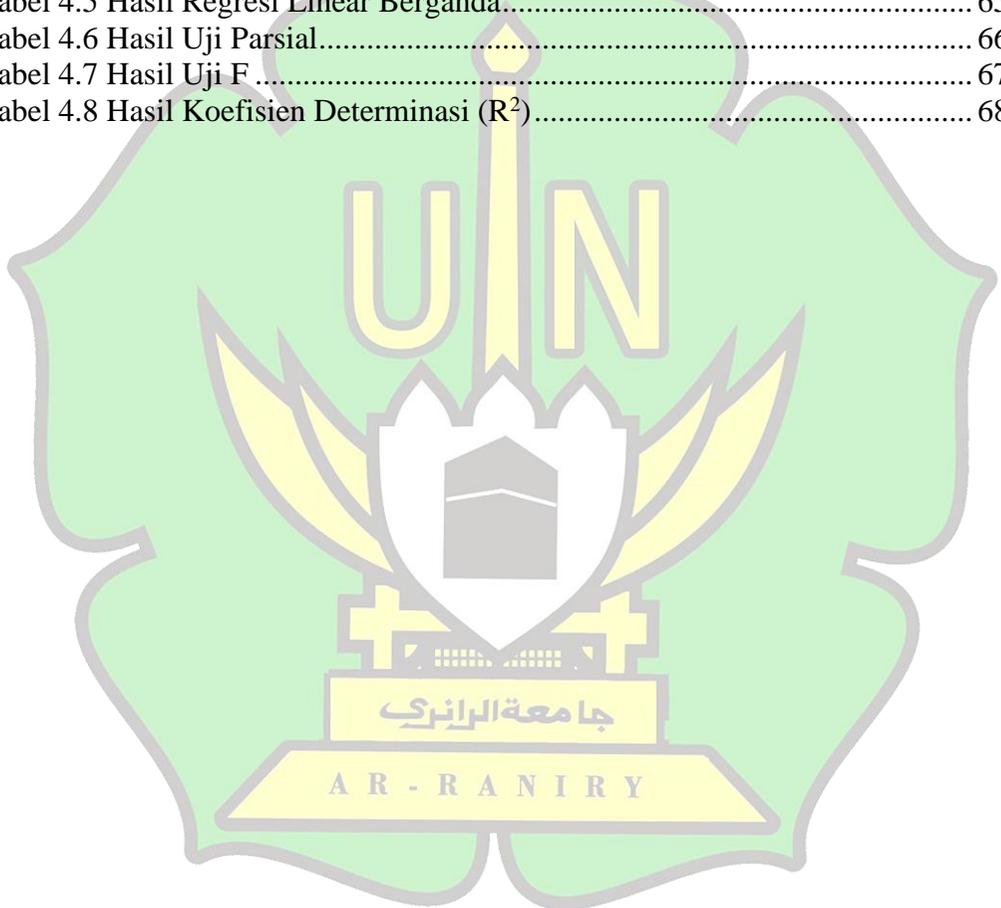
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
2.1 Kemiskinan .....	13
2.1.1 Pengertian Kemiskinan.....	13
2.1.2 Jenis-Jenis Kemiskinan .....	13
2.1.3 Faktor Penyebab Kemiskinan.....	15
2.2 Kebijakan Pemerintah dalam Menurunkan Kemiskinan .....	17
2.2.1 Bidang Sosial.....	17
2.2.2 Bidang Perekonomian .....	21
2.2.3 Bidang Agama.....	23
2.2.4 Komite Penanggulangan Kemiskinan .....	24

2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....	26
2.3.1 Pengertian UMKM .....	26
2.3.2 Karakteristik UMKM .....	28
2.3.3 Kemiskinan Sebagai Alasan Perlunya Memberdayakan UMKM .....	31
2.4 Subsidi .....	34
2.4.1 Pengertian Subsidi .....	34
2.4.2 Manfaat dan Efek Buruknya Pelaksanaan Subsidi .....	35
2.4.3 Subsidi di APBN Indonesia .....	36
2.5 Hubungan Antar Variabel .....	38
2.5.1 Pengaruh UMKM Terhadap Penurunan Kemiskinan .....	38
2.5.2 Pengaruh Subsidi Terhadap Penurunan Kemiskinan .....	38
2.6 Peneitian Terkait .....	39
2.7 Kerangka Berpikir .....	43
2.8 Hipotesis Penelitian .....	43
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	45
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.4 Variabel Penelitian .....	46
3.4.1 Klasifikasi Variabel Penelitian .....	46
3.5 Metode Analisis Data .....	47
3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	47
3.6 Uji Asumsi Klasik .....	48
3.6.1 Uji Normalitas .....	48
3.6.2 Uji Multikolinieritas .....	48
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas .....	49
3.6.4 Uji Autokolerasi .....	49
3.7 Pengujian Hipotesis .....	50
3.7.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t) .....	50

3.7.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F).....	50
3.7.3 Koefisien Determinasi R <sup>2</sup> .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	52
4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	53
4.3 Kemiskinan.....	55
4.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....	58
4.5 Subsidi .....	60
4.6 Analisis Hasil Penelitian.....	61
4.6.1 Uji Asumsi Klasik.....	61
4.6.2 Uji Normalitas .....	62
4.6.3 Uji Multikolinieritas .....	62
4.6.4 Uji Heteroskedastisitas .....	63
4.6.5 Uji Autokorelasi .....	64
4.7 Analisis Regresi Linear Berganda .....	64
4.8 Pengujian Hipotesis .....	66
4.8.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t) .....	66
4.8.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F).....	67
4.8.3 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	68
4.9 Pembahasan Penelitian .....	68
4.9.1 Pengaruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Kemiskinan.....	68
4.9.2 Pengaruh Subsidi Terhadap Kemiskinan.....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

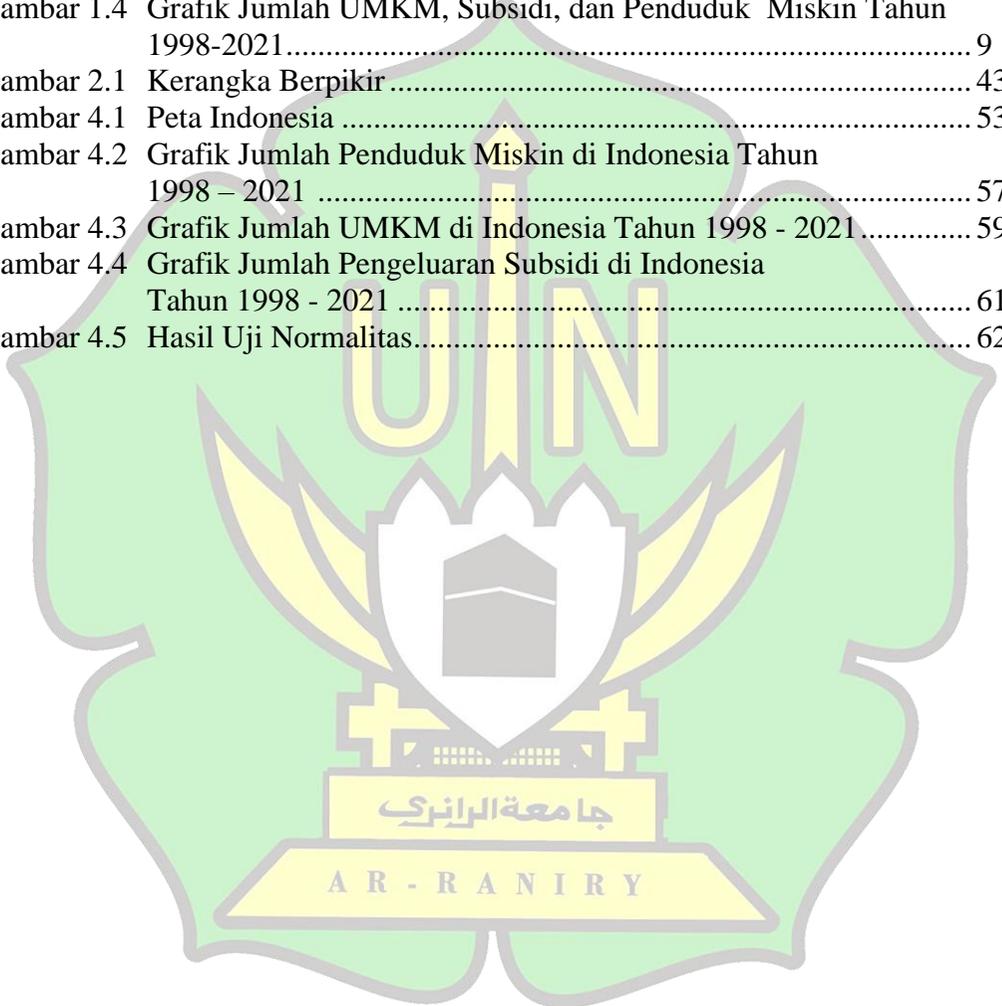
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	39
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.....	46
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	53
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas.....	63
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas – <i>Glejser Test</i> .....	63
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi – <i>Serial Correlation LM Test</i> .....	64
Tabel 4.5 Hasil Regresi Linear Berganda.....	65
Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial.....	66
Tabel 4.7 Hasil Uji F .....	67
Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	68



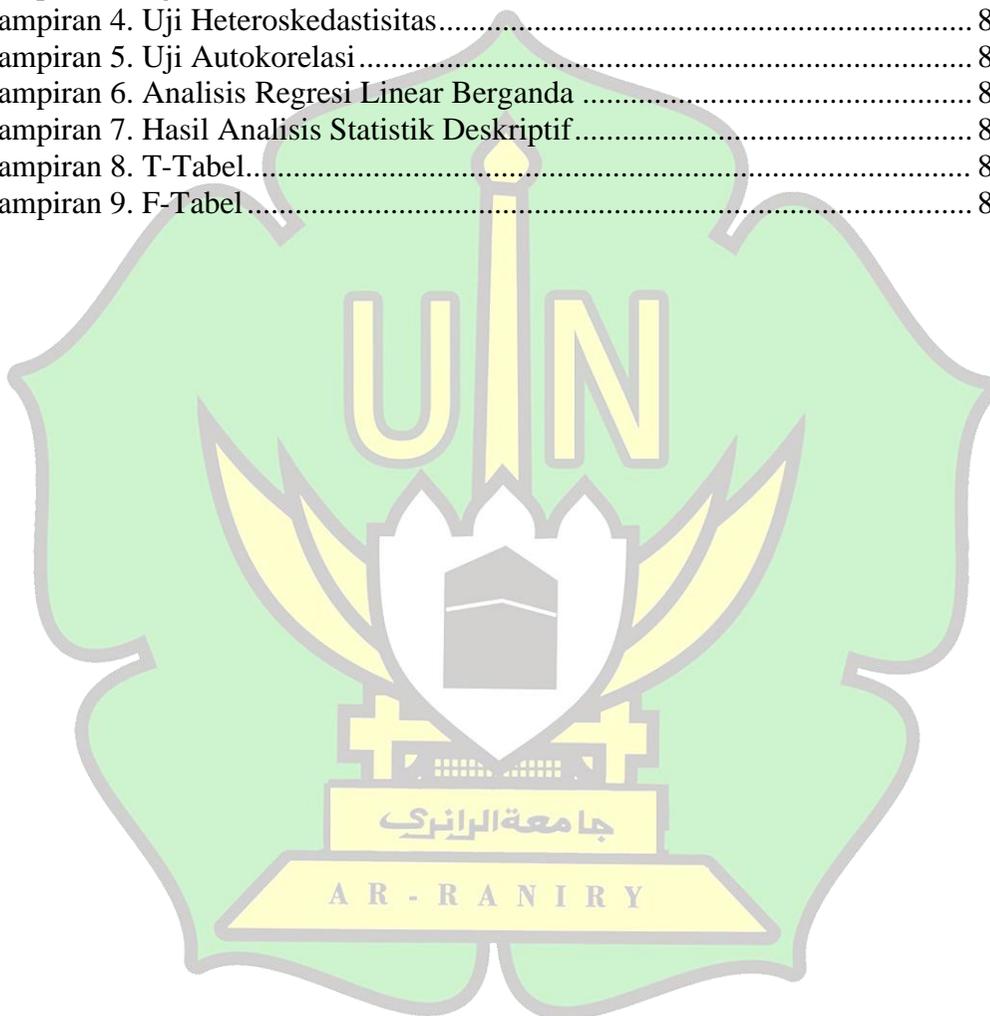
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1998-2021	3
Gambar 1.2	Grafik Jumlah UMKM dan Penduduk Miskin Tahun 1998-2021	5
Gambar 1.3	Grafik Jumlah Subsidi dan Penduduk Miskin Tahun 1998-2021.....	8
Gambar 1.4	Grafik Jumlah UMKM, Subsidi, dan Penduduk Miskin Tahun 1998-2021.....	9
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	43
Gambar 4.1	Peta Indonesia.....	53
Gambar 4.2	Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1998 – 2021 .....	57
Gambar 4.3	Grafik Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 1998 - 2021.....	59
Gambar 4.4	Grafik Jumlah Pengeluaran Subsidi di Indonesia Tahun 1998 - 2021 .....	61
Gambar 4.5	Hasil Uji Normalitas.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah UMKM dan Jumlah Pengeluaran Subsidi Tahun 1998-2021 .....	78
Lampiran 2. Uji Normalitas .....	79
Lampiran 3. Uji Multikolinearitas .....	80
Lampiran 4. Uji Heteroskedastisitas .....	81
Lampiran 5. Uji Autokorelasi .....	81
Lampiran 6. Analisis Regresi Linear Berganda .....	82
Lampiran 7. Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	83
Lampiran 8. T-Tabel .....	84
Lampiran 9. F-Tabel .....	84



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang tidak pernah habis dibicarakan oleh negara-negara yang sedang berkembang, misalnya Indonesia. Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya perbedaan antar daerah dan kelompok masyarakat yang disebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat atas dan masyarakat bawah di Indonesia semakin meluas. Pemerintah sendiri selalu merencanakan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, namun tingkat kemiskinan di Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan. Kemiskinan itu sendiri ditandai dengan taraf kehidupan yang rendah, dimana masyarakat atau penduduk masih kekurangan kebutuhan pokok (Khairi, 2018). Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat multidimensional, seperti korupsi, pendidikan, ketidakstabilan politik, geografis, karakteristik, pemerintahan lokal yang tidak efektif dan kebijakan pemerintah atau kemiskinan juga bisa disebabkan oleh faktor budaya dan struktural.

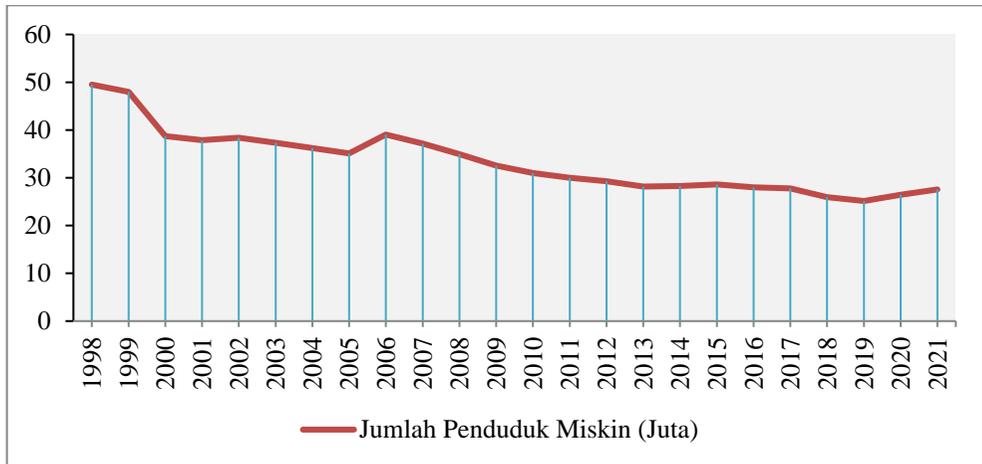
Sejarah mencatat krisis finansial di kawasan Asia yang terjadi pada tahun 1997 telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin membengkak dan kondisi tersebut diikuti pula dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa tingginya jumlah penduduk miskin yang diikuti dengan penanggulangan kemiskinan namun terjadi kegagalan bukan semata-mata kesalahan dari pemerintah, namun bisa terjadi karena kondisi ekonomi di dunia sedang tidak baik (Murdiana dan Mulyana, 2017). Dampak yang ditimbulkan dari fenomena kemiskinan di masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan anak-anak, pengangguran,

ketidakmerataan pembangunan, kriminalitas, dan lainnya (Rukiah dan Ulan, 2022).

Indonesia sebagai negara berkembang yang mengedepankan kepentingan rakyat tentu saja melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, sebagaimana Presiden Joko Widodo saat mulai menjabat tahun 2014 sampai sekarang telah memproklamkan Program Nawacita yang berisi tentang 9 (Sembilan) prioritas pembangunan. Dimana, program Presiden Joko Widodo selama menjadi Presiden Republik Indonesia terdapat 2 (dua) Program Nawacita yang pro pada program pengentasan kemiskinan, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat (Murdiyana dan Mulyana, 2017).

Efektifitas kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah memainkan peran penting dalam generasi kemiskinan. Bantuan sosial dari era ke era, dari tahun ke tahun masih menjadi alternatif pengambil kebijakan di bidang kemiskinan. Walaupun, bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin belum menghasilkan penanggulangan kemiskinan yang signifikan (Saragih, 2015). Orang miskin masih dijadikan sebagai objek penerima bantuan sehingga membuat mereka tidak akan kreatif dalam memproduksi hanya menerima bantuan dari pemerintah. Berikut grafik jumlah penduduk miskin tahun 1998-2021 di Indonesia:

**Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1998-2021**



*Sumber: BPS yang diolah dari survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022*

Gambar 1.1 menjelaskan jumlah penduduk miskin dari tahun 1998 sampai 2021. Terlihat naik turunnya jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin meningkat sangat banyak dan pada tahun 2013 sampai dengan 2021 terlihat jumlah penduduk miskin berkurang walaupun hanya sedikit. Hal ini disebabkan adanya kebijakan-kebijakan yang diupayakan oleh pemerintah setiap tahunnya dengan cara yang berbeda-beda untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia.

Strategi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia berjalan cukup baik ditandai dengan berbagai upaya pemerintah dalam mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian merumuskan program-program pengentasan kemiskinan. Kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari kebijakan sosial. Misalnya melalui Program Bantuan Sosial (Bansos) yaitu bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial

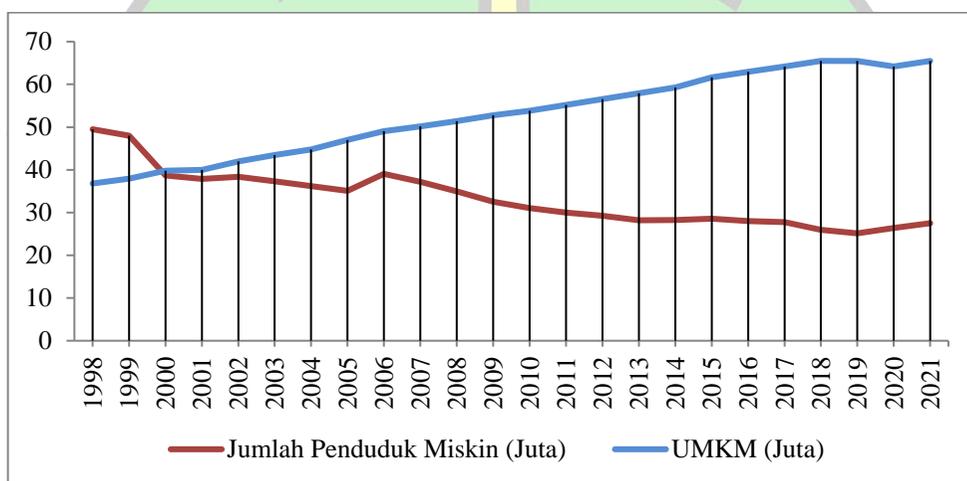
(Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017). Selanjutnya, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat kurang mampu atau miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar (seperti pendidikan dan kesehatan), pengembangan UMKM serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya (Tisniwati, 2012).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sangat banyak digeluti oleh masyarakat dan telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Vina, 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa Dunia Usaha di Indonesia dibagi menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Usaha mikro secara definitif adalah usaha milik perseorangan sementara usaha besar adalah usaha yang lebih besar daripada usaha menengah (Abduh, 2017).

Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang cukup baik dalam membantu penurunan angka kemiskinan di Indonesia, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30% (Darminto, 2015). Penyerapan tenaga kerja tersebut berperan penting dalam mengatasi masalah pengangguran, dimana tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan (Nurul, 2019). Awal penerapan kebijakan UMKM sampai sekarang secara

keseluruhan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik seiring berganti tahun yang ditandai jumlah UMKM mencapai angka 63 juta dan secara persentase jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Hal tersebut menyatakan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi negara (Hemas, 2021). Berikut gambar jumlah UMKM tahun 1998-2021 di Indonesia:

**Gambar 1.2 Grafik Jumlah UMKM dan Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1998-2021**



Sumber: BPS yang diolah dari survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022

Gambar 1.2 menjelaskan perbandingan UMKM dan jumlah penduduk miskin dari tahun 1998 sampai 2021. Terlihat bahwa jumlah penduduk miskin semakin turun jadi UMKM berpengaruh positif terhadap penduduk miskin. Seiring dengan peningkatan garis UMKM terlihat bahwa diikuti dengan semakin menurunnya jumlah penduduk miskin, maka dengan hadirnya UMKM sangat membantu pemerintah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Terbukti jelas semakin tinggi jumlah UMKM maka jumlah penduduk miskin semakin menurun. kesimpulannya bahwa program UMKM bersifat efektif terhadap

penurunan garis kemiskinan dan UMKM merupakan salah satu program efektif yang dilakukan pemerintah kalau pemerintah konsisten ingin menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal ini memberikan dampak bagi jumlah penduduk miskin yang setiap tahun angkanya berkurang, perkembangan jumlah UMKM yang diminati oleh masyarakat semakin bertambah setiap tahunnya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkeu, 2021). Dimana, APBN membiayai UMKM salah satunya dengan pemberian subsidi dengan arah kebijakan untuk mempertahankan stabilitas harga pokok pangan, menjaga daya beli masyarakat miskin, menjaga pasokan kebutuhan pangan, dan meningkatkan daya saing produksi dan permodalan para UMKM menjadi lebih meningkat (Indonesia, APBN 2015). Artinya subsidi juga menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dimana subsidi dijadikan instrumen kebijakan penting yang diadopsi oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan (Wahyu, 2018).

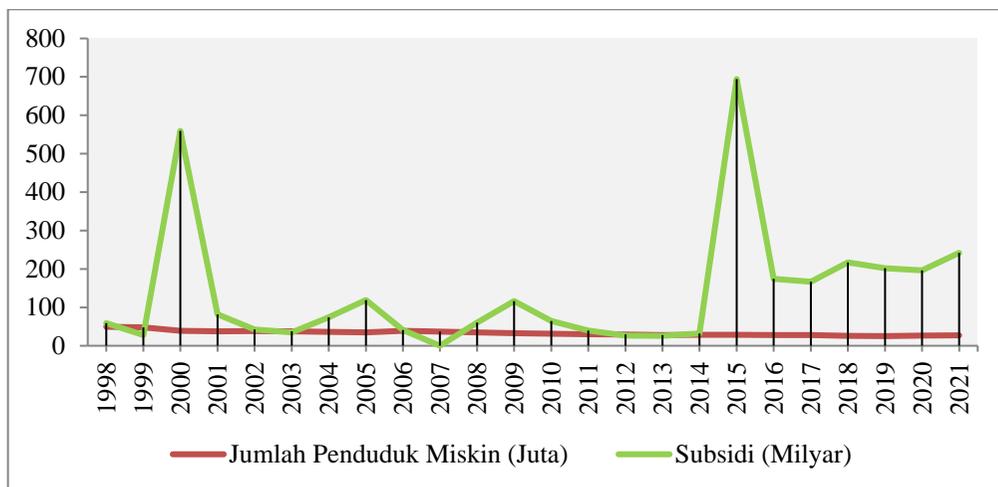
Kebijakan anggaran subsidi diarahkan melalui kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran, yaitu melalui pengendalian besaran subsidi energi dan subsidi non energi serta menyediakan tambahan anggaran untuk antisipasi subsidi tepat sasaran (Munawar, 2013). Selanjutnya, keberadaan subsidi mendukung Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi selama pandemi. Bentuk subsidi bisa Materi, Uang, Kebutuhan sembako, Barang hingga keringanan biaya. Biasanya, golongan yang menjadi penerima subsidi adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Subsidi yang diberikan pemerintah ini bersumber dari pajak. Jadi, uang pajak yang dipungut oleh pemerintah kembali lagi ke dalam lingkup masyarakat melalui pemberian subsidi (Anugrah, 2022).

Perubahan besaran nilai subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa saja terjadi karena disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari masyarakat. Seperti pada tahun 2020 tercatat biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sebanyak Rp. 192 triliun yang terbagi atas Rp. 96,4 Triliun untuk subsidi energi dan Rp. 95,6 Triliun untuk subsidi nonenergi dengan tingkat pertumbuhan -4,8% yang menandakan penurunan anggaran pendanaan terhadap biaya subsidi (Indonesia APBN, 2020) sedangkan di tahun 2021 biaya yang dikeluarkan pemerintah sebanyak Rp. 175,4 Triliun dimana Rp. 64,8 Triliun alokasi subsidi energi dan Rp. 110,5 subsidi nonenergi dengan tingkat pertumbuhan -8,7% (Indonesia, Informasi APBN, 2021).

Subsidi diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau *purchasing power* (kemampuan masyarakat untuk membeli) adalah kekuatan uang atau jumlah barang yang dapat dibeli oleh seorang individu dengan jumlah uang tertentu. Banyak pertimbangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar penganggaran yang diberikan untuk subsidi dapat memenuhi target subsidi dengan memperhatikan kemampuan finansial yang dimiliki oleh negara (Anugrah, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2015) menyimpulkan bahwa UMKM sebagai bagian dari perekonomian juga harus lebih meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi. Keunggulan bersaing berbasis inovasi dan kreativitas harus lebih diutamakan karena mempunyai daya tahan dan jangka waktu lebih panjang. Pemberian subsidi untuk membangun suatu UMKM ini dapat menuntaskan permasalahan angka kemiskinan di Indonesia. Berikut grafik jumlah subsidi dan penduduk miskin tahun 1998-2021 di Indonesia:

**Gambar 1.3 Grafik Jumlah Subsidi dan Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1998-2021**



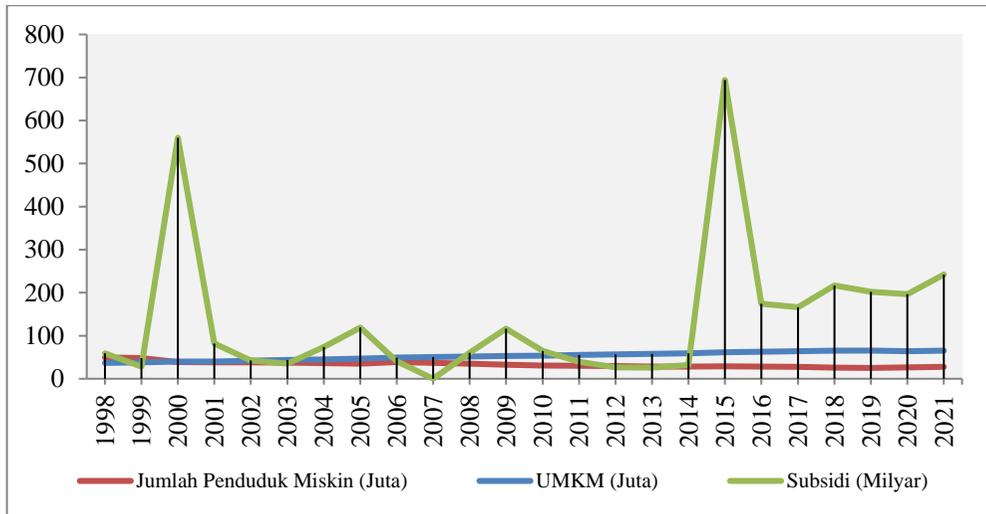
Sumber: BPS yang diolah dari survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022

Gambar 1.3 menunjukkan jumlah subsidi yang dikeluarkan dari tahun 1998 sampai 2021 dengan jumlah berbeda-beda setiap tahunnya. terlihat bahwa jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan subsidi jalannya itu stagnan artinya subsidi tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap mengurangi tingkat kemiskinan. Subsidi yang dikeluarkan per tahunnya pun akan diberikan kepada masyarakat untuk menunjang UMKM yang ada. Berikut grafik jumlah UMKM, subsidi dan penduduk miskin tahun 1998-2021 di Indonesia:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Gambar 1.4 Grafik Jumlah UMKM, Subsidi, dan Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1998-2021**



Sumber: BPS yang diolah dari survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022

Gambar 1.4 menjelaskan jumlah subsidi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM), dan penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1998 sampai 2021. Terlihat bahwa dari ketiga jumlah ini UMKM yang semakin bertambah setiap tahunnya mempengaruhi angka penduduk miskin. Walaupun jumlah subsidi yang dikeluarkan setiap tahun tidak stabil artinya ada tahun yang subsidi yang dikeluarkan banyak dan ada tahun subsidi yang dikeluarkan lebih sedikit tidak akan mempengaruhi jumlah UMKM yang ada saat ini. karena subsidi yang dilakukan oleh pemerintah itu mengarah ke UMKM maka akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan, melihat tingkat UMKM ini semakin tinggi menunjukkan bahwa ada bagian dari subsidi memang dialokasikan untuk UMKM sehingga membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

Subsidi yang diberikan ke masyarakat ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengembangkan UMKM sekarang ini. Hasil penelitian oleh Sugiri (2020) mengatakan bahwa memetakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM serta memetakan strategi jangka pendek dan panjang yang

diperlukan sebagai pelengkap kebijakan tersebut dan perlu dukungan agar menjaga kesinambungan UMKM sebagai salah satu pelaku perekonomian Indonesia sehingga sesuai dengan hasil penelitian Handayani (2015) yang menyimpulkan bahwa perekonomian yang bertambah akan meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga dapat menyerap tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mampu mengangkat masyarakat keluar dari garis kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas UMKM dan subsidi merupakan kebijakan pemerintah dalam penurunan kemiskinan di Indonesia. Peneliti memandang perlu dilakukan suatu penelitian dan mengkaji bagian-bagian dari UMKM dan subsidi tersebut dengan judul penelitian **“Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penurunan Kemiskinan di Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh UMKM terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh subsidi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh UMKM dan subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh UMKM terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.
2. Pengaruh subsidi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.
3. Pengaruh UMKM dan subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi tentang UMKM dan subsidi yang menjadi kebijakan pemerintah dalam penurunan kemiskinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi atau mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi tentang UMKM dan subsidi yang menjadi kebijakan pemerintah dalam penurunan kemiskinan di Indonesia.
- b. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan agar dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia.

#### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori yang terdapat di dalamnya beberapa teori tentang kemiskinan, umkm, subsidi, dan terdapat juga penelitian terkait, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

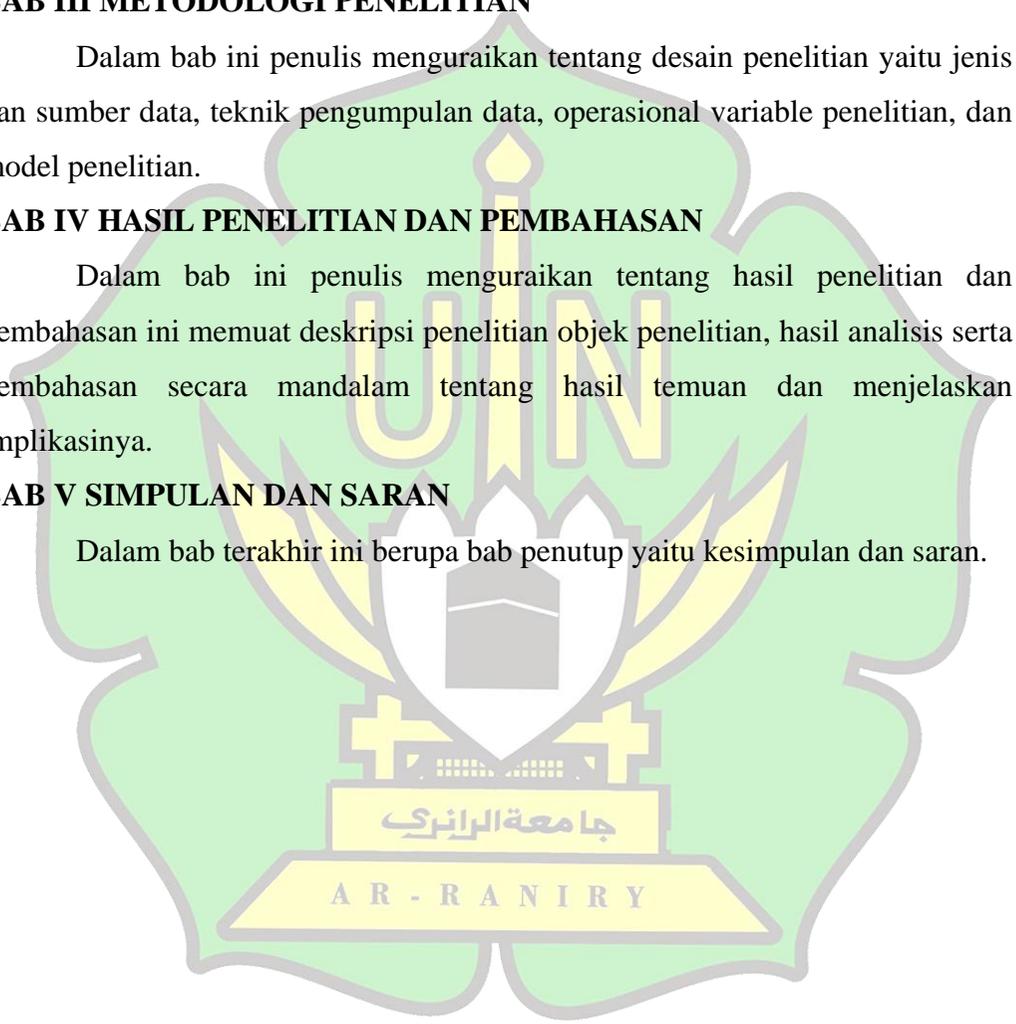
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang desain penelitian yaitu jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variable penelitian, dan model penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan ini memuat deskripsi penelitian objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mandalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab terakhir ini berupa bab penutup yaitu kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kemiskinan**

##### **2.1.1 Pengertian Kemiskinan**

Pengertian kemiskinan memiliki berbagai makna, dalam arti sempit, kemiskinan dapat didefinisikan keadaan seseorang yang tidak memiliki uang dan barang untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Kemiskinan dalam Kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata “miskin”, yang diartikan tidak memiliki harta benda dan berpenghasilan rendah (Departemen Pendidikan, 2008). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan departemen sosial, kemiskinan merupakan tidak mampunya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar atau primer seperti kebutuhan untuk makan dan minum. Orang atau masyarakat dikatakan miskin, jika pendapatan atau penghasilan yang ia terima dalam satu bulan tidak sampai rata-rata pendapatan penduduk, atau pendapatan setiap bulannya di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Menurut John Friedman kemiskinan adalah terjadinya kekuasaan sosial yang tidak seimbang. Kekuasaan sosial dikategorikan menjadi 5 bagian; pertama, memiliki modal yang berkembang seperti, tanah perumahan, perlengkapan dan kesehatan. Kedua, memiliki sumber pendapatan contohnya, mendapat pinjaman yang mencukupi. Ketiga, kelompok sosial dalam berpolitik, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan bersama. Keempat, memiliki jaringan yang luas, jaringan yang luas akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau barang-barang yang dibutuhkan. Kelima, mempunyai informasi tentang kondisi sekitar yang bermanfaat untuk bertahan hidup (Mujahidin dan Mahardika, 2017).

### 2.1.2 Jenis-Jenis Kemiskinan

Kemiskinan yang ada di sekitar kita terdapat jenis-jenisnya, berikut ini jenis kemiskinan yakni (Khomsan, 2015):

- a. Kemiskinan absolut merupakan seseorang yang memiliki pendapatan sangat kecil atau di bawah garis kemiskinan setiap bulannya. Dan orang miskin berjenis absolut juga tidak dapat memenuhi akan kebutuhan sehari-hari misalnya, kesehatan, sandang, pangan dan dia tidak dapat bekerja untuk memenuhi kehidupan.
- b. Jenis kemiskinan yang kedua adalah kemiskinan relatif, seseorang yang termasuk dalam jenis ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata, di mana pembangunan-pembangunan belum sampai di tempat atau daerah mereka. Hal ini menyebabkan kurangnya akses untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar, dan pendapatan masyarakat jenis ini di bawah garis kemiskinan.
- c. Miskinnya seseorang atau masyarakat disebabkan faktor kultur atau budaya. Di mana sekelompok masyarakat terlalu mengikuti kebudayaan yang tidak sesuai dengan kebudayaan asli mereka, misalnya memiliki sifat yang boros, malas bekerja dan tidak memiliki kreatifitas.
- d. Kemiskinan yang terstruktur merupakan yang disebabkan oleh tidak cukupnya SDM seseorang, atau tidak memiliki pengetahuan. SDM dan pengetahuan yang baik akan menunjang seseorang atau kelompok untuk berfikir lebih maju dan berkembang, jika terdapat kelompok yang berkumpul pada satu tempat dengan SDM yang rendah akan menyebabkan terjadinya kemiskinan.

### 2.1.3 Faktor Penyebab Kemiskinan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang ternyata bisa berdampak serius, menurut Widyastuti (2021) penyebab kemiskinan meliputi faktor eksternal maupun internal sebagai berikut:

- a. Faktor eksternal diartikan sebagai faktor penyebab kemiskinan yang berasal dari luar pribadi seseorang. Contohnya pandemi, iklim yang berubah, kehidupan sosial dan kebijakan pemerintah.
- b. Faktor internal merupakan penyebab kemiskinan yang bersumber dari dalam pribadi seseorang, seperti keterbatasan fisik, bodoh, malas dan sebagainya.

Menurut Bank Dunia (2007) terdapat beberapa korelasi atau hubungan yang menyebabkan miskin:

- a. Pendidikan

Pendidikan rendah merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan orang atau kelompok menjadi miskin, karena pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji atau upah yang besar, sementara orang dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih susah untuk mendapatkan pekerjaan, jika dapat gaji yang akan diterima lebih sedikit dengan orang yang memiliki pendidikan yang tinggi.

- b. Pekerjaan

Seseorang yang memiliki pekerjaan akan memiliki pendapatan, sebaliknya seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan akan menjadi beban di dalam keluarga atau kelompok. Memiliki pekerjaan dan memiliki pendapatan yang tetap setiap bulanya akan menghindarkan kita dari kemiskinan.

c. Gender

Seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga lebih baik dari pada perempuan yang menjadi kepala keluarga. Akan tetapi pada nyatanya tidak demikian, pada saat ini banyak perempuan yang berhasil mensejahterkan keluarganya untuk menghindari dari kemiskinan. Di daerah perkotaan rata-rata yang menjadi kepala keluarga dmiliki pengeluaran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan yaitu 14,4%.

d. Akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar

Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan ketersediaan infrastruktur dapat menunjang kehidupan masyarakat sekitar. Jika pada suatu kelompok tidak menerima pelayanan maka akan terasa sulit untuk bersaing dengan kelompok lainnya, apalagi infrastruktur yang tersedia tidak memadai, yang membuat masyarakat sulit untuk menjalani kehidupan atau berinteraksi dengan kelompok lain. Jika infrastruktur tersedia masyarakat dapat melakukan kegiatan jual beli dengan masyarakat yang berada di daerah lain. tingkat kemiskinan adalah, dengan cara memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah terpencil.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Nugroho (2020) semakin banyak anggota keluarga yang tidak memiliki pendapatan akan menimbulkan kemiskinan dikarenakan tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kemiskinan juga dipengaruhi oleh banyaknya anggota keluarga yang tidak bekerja dapat menambah beban hidup yang harus di cukupkan.

## **2.2 Kebijakan Pemerintah dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan**

Masa Indonesia mencapai kemerdekaan, pemerintah pada masa itu telah memberikan perhatian pada kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai dasar hukum utama dalam bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia) Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 34 berisi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Dan Pasal 27 ayat (2) berisi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Atas dasar pasal-pasal tersebut, kemudian pemerintah melakukan pembuatan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bidang.

### **2.2.1 Bidang Sosial**

Ketentuan dalam Pasal 33, 34 dan 27 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan. Sejumlah peraturan telah dikeluarkan berkaitan dengan hal ini. Pada tahun 1974, baru terbentuk UU yang mengatur secara khusus mengenai kesejahteraan sosial (UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial). Dalam Pasal 2 ayat (1) UU ini disebutkan bahwa kesejahteraan sosial ialah:

“suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”

UU ini antara lain mengatur mengenai tugas dan usaha yang harus dilakukan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Tugas pemerintah adalah:

- a. menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.
- b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat.
- c. melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Usaha-usaha pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ini adalah:

- a. bantuan sosial kepada warga negara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain.
- b. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistem jaminan sosial.
- c. bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada warga negara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat.
- d. pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong-royongan.

Undang-Undang ini pun memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebelum adanya UU tentang Kesejahteraan Sosial, pada tahun 1965 telah terlebih dulu terbit UU No. 4/1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. UU yang berdasar pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ini bertujuan untuk memberikan bantuan penghidupan kepada orang-orang

jompo dalam rangka penyempurnaan susunan masyarakat yang adil dan makmur. Yang dimaksud dengan orang jompo dalam Pasal 1 disebutkan ialah “setiap orang yang berhubung dengan lanjutnya usia, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi hidupnya sehari-hari.”

Bantuan penghidupan yang diberikan kepada orang jompo ini adalah berupa tunjangan (berupa pemberian bahan-bahan keperluan hidup atau uang) dan perawatan (yang diberikan di rumah sendiri, rumah peristirahatan atau pengasuhan pada suatu keluarga). Bantuan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi dapat juga dilakukan oleh organisasi swasta atau perseorangan yang diawasi langsung oleh pemerintah (di bawah menteri sosial). Tindak lanjut pemerintah dalam melaksanakan UU tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah menerbitkan peraturan lebih lanjut dalam PP No. 31/1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dan PP No. 42 /1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin. Dalam menanggulangi para gelandangan dan pengemis dalam masyarakat, dalam PP No.31/1980 ini mendefinisikan masing-masing istilah tersebut dalam Pasal 1. Gelandangan ialah “orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.” Sedangkan pengemis adalah “orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan gelandangan dan pengemis ini bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Usaha preventif yang bertujuan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis dalam masyarakat adalah berupa penyuluhan dan

bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, dan peningkatan derajat kesehatan. Usaha represif yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan gelandangan dan pengemis adalah berupa razia, penampungan sementara untuk diseleksi, dan pelimpahan. Dan usaha rehabilitasi yang bertujuan agar fungsi sosial dari para gelandangan dan pengemis dapat berperan kembali dalam masyarakat adalah berupa penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut yang kesemuanya itu dilaksanakan melalui panti sosial.

Penanggulangan terhadap gelandangan dan pengemis, melalui PP No. 42 /1981 pemerintah juga memberikan kebijakan untuk melayani kesejahteraan sosial bagi fakir miskin. Yang dimaksud fakir miskin dalam Pasal 1 angka 1 PP ini adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Pelayanan yang diberikan kepada fakir miskin ini adalah berupa bantuan sosial dan rehabilitasi sosial.

Bantuan sosial diberikan agar para fakir miskin ini dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Bantuan ini terutama dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara minimal, yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Rehabilitasi sosial diberikan agar para fakir miskin mampu melaksanakan dan mengembangkan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi ini meliputi usaha seleksi, pembinaan, pengembangan, dan pembinaan lanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan primer manusia yaitu tempat tinggal, pemerintah mengeluarkan UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Pada Pasal 3 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa “memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat,

terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya.” UU ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki tempat tinggal dengan berupa hak milik.

### **2.2.2 Bidang Perekonomian**

Tahun 1999, Tim Peneliti Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU) melakukan penelitian di 43 kabupaten di Indonesia. Penelitian dengan model survei ini hanya fokus pada dampak deregulasi terhadap pendapatan petani dan margin perdagangan. Adapun hasil penelitian tersebut diringkas di bawah ini. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Kesulitan yang dialami oleh usaha yang berskala besar memberikan peluang pada usaha kecil dan para petani untuk melayani segmen pasar tertentu yang ditinggalkan oleh usaha besar. Peluang ini didukung oleh sejumlah kebijakan pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan distorsi pasar di sektor riil. Kebijakan-kebijakan pemerintah ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai contoh, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat antara lain:

1. Pembubaran BPPC melalui Keppres No. 21 Tahun 1998
2. Pelarangan peneanaan pungutan atas barang-barang ekspor dengan Inpres No. 1 tahun 1998 yang pelaksanaannya saling mendukung dengan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1997
3. Pencabutan larangan perdagangan komoditi antar pulau, propinsi, dan kabupaten
4. Pencabutan peraturan dan kebijakan niaga yang diatur oleh propinsi dan kabupaten dengan Inpres No. 2 Tahun 1998

5. Penghentian kewajiban menanam tebu bagi petani (Program TRI) dengan Inpres No. 5 Tahun 1998
6. Penghapusan sistem kuota yang membatasi perdagangan ternak potong

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Penghapusan tata niaga hasil produksi rakyat di NTT yang harus melalui KUD
2. Penghapusan tata niaga jeruk di Kalbar yang diwajibkan melalui konsorsium tertentu
3. Pencabutan penunjukan satu asosiasi untuk menarik retribusi perdagangan ikan di Bengkalis
4. Penyesuaian jenis pungutan daerah terhadap UU No. 18 Tahun 1997

Peraturan-peraturan tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan petani, pedagang, dan konsumen. Pengaruh terhadap kesejahteraan petani bahwa perbaikan sistem tata niaga beberapa komoditi pertanian karena perdagangan komoditi pertanian semakin bebas dan alternatif tempat petani menjual hasil pertaniannya semakin banyak sehingga meningkatkan posisi tawar di tingkat petani. Dan dengan berkurangnya pungutan atau retribusi resmi dan tidak resmi telah mengurangi biaya distribusi, sehingga biaya pada harga beli pedagang di tingkat petani akan berkurang. Pengaruh terhadap kesejahteraan pedagang bahwa setelah adanya peraturan-peraturan tersebut rata-rata biaya perdagangan mengalami penurunan sebesar 6,7%. Para pedagang ini lebih mementingkan total keuntungan dari maksimalisasi volume penjualan yang didapat dari turunnya harga penjualan per unit barang. Hal ini memberikan dampak terhadap kesejahteraan konsumen bahwa daya beli para konsumen dapat lebih meningkat.

### 2.2.3 Bidang Agama

Agama yang dianut dan diakui oleh masyarakat Indonesia adalah Islam. Tidak hanya beralasan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, tetapi juga dalam Islam diajarkan seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang sosial dan hukum. Zakat dan wakaf merupakan salah satu ajaran yang ada dalam Islam untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Zakat adalah pengeluaran sejumlah harta yang wajib dilakukan oleh orang Islam dengan syarat-syarat tertentu untuk orang-orang tertentu. Sedangkan wakaf adalah menahan suatu benda yang bertujuan untuk dimanfaatkan dalam waktu lama yang sesuai dengan ajaran Islam.

Bidang zakat, umat Islam yang telah memiliki sejumlah harta dengan ukuran tertentu diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya tersebut untuk orang-orang tertentu saja (disebut *mustahiq*). *Mustahiq* ini terdiri dari golongan fakir (orang yang tidak berpenghasilan tetap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup utamanya), miskin (orang yang berpenghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup utamanya), amil (pengelola zakat), muallaf (orang baru masuk Islam), riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang berhutang), sabilillah (orang yang berusaha untuk kepentingan ajaran Islam), dan ibnussabil (orang yang berada dalam perjalanan). Adanya potensi yang besar pada zakat dalam menangani masalah kemiskinan atau dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial ini, maka dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat pada tahun 1999.

Bidang wakaf, adanya benda yang diwakafkan bersifat kekal dan bermanfaat dalam waktu lama yang dapat dirasakan oleh banyak orang juga memberikan peluang untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pada tahun 1977, baru terbentuk peraturannya berupa PP (Peraturan Pemerintah) sebagai tindak lanjut dari UU tentang Pokok-pokok Agraria atas peraturan mengenai tanah

wakaf. Dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat dan tidak terbatas pada tanah sebagai benda yang dapat diwakafkan, maka pada tahun 2004 (sekitar bulan September atau Oktober) baru saja dikeluarkan UU tentang Wakaf yang telah mengatur benda wakaf baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disebutkan di atas tentunya tidak akan berarti apabila pemerintah tidak mewujudkannya. Adanya rumah-rumah singgah, panti-panti sosial berupa panti asuhan dan panti jompo yang didirikan oleh pemerintah maupun organisasi swasta menunjukkan pelaksanaan atas kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai perlindungan terhadap orang jompo, pelayanan terhadap fakir miskin, dan penanggulangan terhadap gelandangan dan pengemis. Meskipun demikian, masih banyak terlihat masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin menyebar, khususnya di Jakarta. Potensi zakat dan wakaf untuk kesejahteraan sosial, telah menggugah hati masyarakat untuk segera mewujudkannya. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah dan anggota masyarakat itu sendiri (organisasi sosial). BAZIS DKI Jakarta (dari pemerintah), Dompot Dhuafa, Baitul Mal Muamalat, dan Dompot Peduli Umat (dari masyarakat) adalah sebagian contoh organisasi yang mengelola zakat dan wakaf untuk digunakan sebagaimana mestinya.

#### **2.2.4 Komite Penanggulangan Kemiskinan**

Berdasarkan selain hal tersebut di atas, pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat. Hal ini terbukti dengan terbentuknya Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Pada awalnya, badan ini disebut dengan Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) yang didirikan pada bulan April 2001 di bawah koordinasi Wakil Presiden (yang menjabat pada saat itu adalah Hamzah Haz). BKPK ini

dipimpin oleh anggota IMF. Karena memang pada saat itu, IMF mendesak pemerintah untuk segera melakukan penanggulangan terhadap kemiskinan. Kemudian badan ini berubah menjadi KPK yang diketuai oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial.

KPK dibentuk oleh Presiden RI (yang menjabat pada saat itu adalah Megawati) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 2001 jo. Nomor 8 Tahun 2002 jo. Nomor 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan. Komite ini sengaja dibentuk khusus untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan melibatkan forum lintas pelaku yang meliputi forum nasional dan forum regional dan/atau forum nasional-regional, yang terdiri dari semua unsur bangsa mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan perbankan, usaha nasional, dan kelompok swadaya masyarakat dalam menggalang kontribusi gagasan dan saran implementasi yang konstruktif dan maju yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan menurunkan populasi penduduk miskin dalam ukuran yang signifikan.

Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002. Fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan Panduan Umum yang diperlukan bagi pelaksanaannya di daerah;
2. Memantau pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah dan memberikan panduan kebijakan lanjutan yang ditetapkan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing;
3. Membina pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah;
4. Melaporkan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan kepada Presiden. (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002)

Penyelenggaraan Komite dilaksanakan dalam tiga fase yang secara kumulatif dilaksanakan selama 10 tahun. Fase pertama dimulai sejak tahun 2001 sampai tahun 2004. Fase kedua dimulai dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Selanjutnya Fase ketiga dimulai dari sampai tahun 2008 sampai tahun 2010. (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002). Berdasarkan Laporan Bulan Desember 2002, KPK telah melakukan sejumlah kegiatan, antara lain lokakarya dan diskusi mengenai program penanggulangan kemiskinan, kerjasama antara Bank Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang pemberdayaan perempuan melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta melakukan sosialisasi ke sejumlah provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan NTB.

## **2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **2.3.1 Pengertian UMKM**

UMKM merupakan implikasi dari pembagian/kriteria usaha dalam konteks di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat kriteria tersebut akan memberikan dampak pada penentuan kebijakan usaha yang terkait. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut (Rizky 2012), Usaha mikro merupakan usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usaha yang dilakukan sering berganti-ganti, lokasi usaha yang terkadang kurang tetap, umumnya tidak dilayani oleh perbankan, dan tidak banyak yang memiliki legalitas usaha. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, ditengah derasnya ada kekuatan eksternal yang memang cenderung menggilas usaha kecil (Masudi, 2021).

Ketentuan Umum, khususnya isi Pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut (Masudi, 2021)

### **2.3.2 Karakteristik UMKM**

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Secara umum, usaha mikro dan kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut, yang membedakannya dengan usaha besar yang terdapat di Indonesia (Liedholm dan Mead, 1988):

1. Mempunyai skala usaha yang kecil, baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
2. Banyak berlokasi di perdesaan, kota-kota kecil, atau daerah pinggiran kota besar.
3. Status usaha milik pribadi atau keluarga.
4. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan etnis/geografis yang direkrut melalui pola pemagangan atau pihak ketiga.

5. Pola kerja sering kali paruh waktu atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya. Memiliki kemampuan terbatas dalam adopsi teknologi, pengelolaan usaha, dan administrasi sederhana.
6. Struktur permodalan sangat terbatas, kekurangan modal kerja, dan sangat tergantung sumber modal sendiri serta lingkungan pribadi.
7. Izin usaha sering kali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi.
8. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara cepat.

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM terdapat tiga kategori usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Berikut karakteristik ketiga kategori tersebut:

a. Usaha mikro:

1. Jenis barang/komoditas tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekali pun.
4. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
5. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
6. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
7. Umumnya belum memiliki akses ke perbankan, namun sebagian sudah mengakses lembaga keuangan non-bank.

8. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk nomor pokok wajib pajak (NPWP).

b. Usaha kecil:

1. Jenis barang/komoditas yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah.
2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah.
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.
4. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
5. Sudah membuat neraca usaha.
6. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
7. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
8. Sebagian sudah memiliki akses ke perbankan untuk keperluan modal.
9. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik, seperti perencanaan usaha.

c. Usaha menengah:

1. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas, seperti bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.

2. Melaksanakan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi yang teratur sehingga memudahkan audit dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk oleh perbankan.
3. Menerapkan aturan/pengelolaan terkait perburuhan maupun organisasi perburuhan.
4. Sudah memiliki persyaratan legalitas, seperti izin tetangga.
5. Sudah memiliki akses ke sumber-sumber pendanaan perbankan.
6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

### **2.3.3 Kemiskinan Sebagai Alasan Perlunya Memberdayakan UMKM**

Kemiskinan secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi kekurangan yang terjadi pada seseorang. Kekurangan ini disebabkan oleh ketidak mampuannya untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya, khususnya dalam kebutuhan akan makanan, kesehatan, dan pendidikan. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dirumuskan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia telah menetapkan program dan kebijakan yang pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan kredit usaha. Sektor perpajakan juga telah berpihak kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Pemerintah telah membedakan besaran pajak yang harus dibayar oleh masyarakat mampu, misalnya melalui pajak progresif kendaraan. Besarnya angka kemiskinan memberikan konsekuensi terhadap masyarakat dan bangsa. Konsekuensi kemiskinan, dalam jangka panjang, akan memunculkan kesenjangan sosial dalam masyarakat yang memicu rusaknya relasi social dalam masyarakat. (Gunawan, 2014)

Kemiskinan dalam cakupan yang lebih luas, akan menyebabkan penurunan daya saing sumber daya bangsa. Hal ini berarti bahwa kemiskinan harus diatasi seiring waktu dengan berbagai program dan kebijakan yang relevan. Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang kompleks. Cara penyelesaian kemiskinan dalam sudut pandang yang terfragmentasi, tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya penghasilan masyarakat golongan ekonomi lemah. Penghasilan inilah yang menentukan standar dan kualitas hidup seseorang.

Upaya-upaya terintegrasi yang mampu meningkatkan penghasilan rakyat miskin melalui pekerjaan yang stabil dan merakyat perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki keunggulan sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian, dalam hal sumber daya manusia, Indonesia masih sangat tertinggal dengan Negara-negara lain. Secara kuantitas, angka kemiskinan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Begitu mudah ditemui orang yang masih hidup di bawah standar yang layak. UMKM yang ada di daerah masih belum dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sangat sedikitnya produk UMKM unggulan yang mampu bersaing di pasar lokal, terlebih di pasar internasional (Sudaryanto, 2014).

Pemberdayaan UMKM juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, antara lain, melalui peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor bagi produk-produk. UMKM. Dalam rangka itu, UMKM perlu diberi kemudahan dalam formalisasi dan perizinan usaha, antara lain, dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap

untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perizinan. Adapun langkah langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Penciptaan iklim usaha yang lebih sehat untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, menjamin kepastian usaha, dan mendorong terbentuknya efisiensi ekonomi
2. Pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi pendukung usaha UMKM agar mampu meningkatkan akses kepada sumber daya produktif dalam rangka pemanfaatan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia
3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penumbuhan jiwa dan sikap kewirausahaan, termasuk pemanfaatan iptek dan pemanfaatan peluang yang terbuka di sector agribisnis dan agroindustri
4. Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, ditingkatkan pula kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil (Sudaryanto, 2014).

Cara yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam usaha skala mikro pada sektor informal, ditempuh langkah pemberdayaan usaha mikro sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha mikro, termasuk yang tradisional;
2. Penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro;
3. Penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro;

4. Peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro dan kecil.

## **2.4 Subsidi**

### **2.4.1 Pengertian Subsidi**

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga (masyarakat) dengan tujuan agar pemberian subsidi ini dapat mendorong produksi/konsumsi yang lebih tinggi atau mendorong harga menjadi lebih rendah. Pemberian subsidi ini difokuskan agar dapat membantu masyarakat miskin yang terbatas untuk melakukan kegiatan perekonomian. Subsidi dibedakan menjadi dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang (*in kind subsidy*). Subsidi dalam bentuk uang adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan penghasilan atau kepada produsen untuk dapat menurunkan harga barang. Keunggulan subsidi dalam bentuk uang kepada konsumen adalah lebih murah bagi pemerintah daripada subsidi dalam bentuk penurunan harga dan memberikan kebebasan dalam membelanjakannya. Sedangkan subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu, yaitu pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau pembayaran di bawah harga pasar.

Bentuk dari Subsidi yaitu *Profit Loss* dan *Cost Loss*. Bentuk tersebut sebagai biaya yang dikeluarkan untuk menutupi perbedaan dalam harga jual atau manfaat yang diberikan oleh produk dengan harga pokok atau biaya yang harus dikeluarkan dalam menghasilkan produksi tersebut. Jadi, subsidi dalam bentuk *Profit Loss* adalah bentuk penyamaan harga jual dan harga pokok untuk

menutupi selisih dari untung dan rugi bagi produsen. Sedangkan pada *Cost Loss*, harga jual tidak berdasarkan pada harga pokok melainkan menggunakan harga pasar dimana selisih antara harga pasar dan harga jual menjadi biaya yang harus ditanggung. (Wardana, 2020)

#### **2.4.2 Manfaat dan Efek Buruknya Pelaksanaan Subsidi**

##### **1. Dampak Positif Subsidi**

Dalam memberlakukan subsidi, adapun dampak positif atau manfaat yang diperoleh:

- a. Meningkatkan kemampuan ekonomi, dengan adanya subsidi objek subsidi dapat mengalami penurunan dalam harga dibawah atau setara dengan harga keseimbangannya yang mana akan menjaga daya beli masyarakat.
- b. Jika subsidi ditujukan untuk masyarakat yang berekonomi bawah atau tidak mampu, tentunya akan membantu mereka memenuhi kebutuhan ekonominya dengan harapan ekonomi mereka akan secara bertahap membaik.
- c. Di sisi pelaku usaha, subsidi dapat mencegah kebangkrutan usaha mereka karena subsidi harus tetap memandang keseimbangan pasar dan meningkatkan kualitas ekonominya di atas daya saing dari produk usaha dari luar negeri.

##### **2. Dampak Negatif Subsidi**

Dampak negatif dari adanya subsidi ialah :

- a. Adanya kecenderungan ketika konsumen dapat membayar atas produk yang disubsidi dibawah harga pasarnya, mereka akan melakukan pengeluaran berlebihan ketimbang berhemat akan kenikmatan yang

diterimanya. Jika ini tidak diregulasi, subsidi akan menyebabkan ketidak efisienan dalam distribusinya.

- b. Penyimpangan harga, subsidi dapat menimbulkan penyimpangan harga karena subsidi hanya bertujuan untuk program populis saja tanpa melihat efisiensinya, target subsidinya atau orang yang berhak mendapatkan subsidi berpotensi tidak dapat menikmatinya.
- c. Mengganggu jalannya mekanisme pasar, dikarenakan subsidi memerlukan biaya ekonomi yang sangat besar dan juga melumpuhkan pasar persaingan yang akan merugikan pihak swasta (Ibnu, 2021).

### **2.4.3 Subsidi di APBN Indonesia**

Perencanaan dan pendistribusian subsidi di Indonesia disusun di rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dimana sesuai dengan jenisnya, subsidi termasuk kedalam anggaran belanja pemerintah pusat. Subsidi merupakan penerapan dari fungsi (APBN) yaitu fungsi Alokasi untuk meningkatkan efisiensi, tumbuh dan berkembangnya perekonomian dan menjadi fungsi stabilisasi untuk menyeimbangkan makro ekonomi di negara, tetapi apakah fungsi dan tujuan subsidi itu sudah terwujud dan apakah sudah diterima dengan baik oleh target serta apakah sudah ada dampak baik yang dirasakan oleh subsidi itu haruslah dikaji oleh penyelenggara melalui data-data terkait, indeks kemakmuran masyarakat dan indeks ekonomi negara itu sendiri. Sebagai perbandingan berikut adalah kebijakan APBN 2015 hingga 2019 dalam aturan subsidi. Arah kebijakan subsidi sesuai dengan APBN tahun 2015 ialah untuk, mempertahankan stabilitas harga pokok pangan, menjaga daya beli masyarakat miskin, menjaga pasokan kebutuhan pangan, dan meningkatkan daya saing produksi dan permodalan para UMKM menjadi lebih meningkat. Oleh karena itu 83% subsidi dialokasikan ke subsidi energi dan 17% sisanya

dialokasikan ke subsidi non energi. subsidi energi tersebut mencakup subsidi bahan bakar minyak dan subsidi non energi mencakup subsidi di pangan, pupuk, benih kewajiban pelayanan publik, bunga kredit dan pajak (Indonesia, APBN 2015).

Berdasarkan di tahun 2016, pemerintah ingin lebih fokus dalam penganggaran dan pengalokasian subsidinya untuk tepat sasaran. Misalnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berekonomi kurang melalui bantuan sosial kepada enam juta keluarga swadaya masyarakat. Terdapat juga bantuan berupa kebutuhan pokok melalui program Sejuta Rumah yang berbentuk dukungan pembangunan rumah, subsidi bunga kredit, dan bantuan uang muka rumah (Indonesia, APBN 2016). Di tahun 2017, tetap dengan agenda yang sama yaitu menyalurkan subsidi dan program bantuan sosial non tunai yang lebih tepat sasaran. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan program perlindungan sosial yang dimilikinya, dengan memprioritaskan programnya di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi. Tidak lupa, pemerintah lebih fokus ke desa dengan cara melaksanakan transfer ke daerah dan desa guna pemeratakan pembangunan daerah dan desa (Indonesia, APBN 2017).

Tahun 2018, pemerintah melalui belanja non kementerian/lembaga di APBN mengatur subsidi dalam bentuk energi dan non energi. Dalam subsidi energi, pemerintah ingin efisiensi dan tepat sasaran dalam penyaluran subsidinya, Maka dari itu subsidi energi diarahkan ke masyarakat miskin, dan sebagai bentuk cara untuk mengendalikan inflasi. Pada subsidi non energi, pemerintah ingin adanya integrasi dalam semua bentuk subsidi non energi dengan melalui bantuan sosial (bansos) dan transfer ke daerah sebagai cara untuk mengatur kebutuhan pokok dan meningkatnya kualitas dari pangan (Indonesia, APBN 2018). Di Tahun 2019, Pemerintah dalam merancang APBN menyusun tema

Adil, Sehat, dan Mandiri. Adapun Adil memiliki arti bahwa APBN akan dipergunakan untuk keadilan, seperti menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja baru dan menjaga hubungan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah. Dan penerapan tema ini terbukti dengan adanya anggaran pendidikan yang mencapai Rp 492,5 T yang mengambil 20% bagian dari belanja APBN, anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 415 T, dan transfer ke daerah mencapai alokasi sebanyak Rp 826,8 T dan sebanyak Rp 70 T dari alokasi tersebut dialokasikan ke desa (Indonesia, APBN 2019).

## **2.5 Hubungan Antar Variabel**

### **2.5.1 Pengaruh UMKM Terhadap Penurunan Kemiskinan**

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya meminimalisir jumlah penduduk miskin. Dengan adanya UMKM ini, masyarakat lebih mudah membuka pekerjaan bahkan bisa menciptakan lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat pengangguran. Di Indonesia peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan (Nurul, 2019).

### **2.5.2 Pengaruh Subsidi Terhadap Penurunan Kemiskinan**

Subsidi merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang berpengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Setiap tahunnya subsidi di cairkan dan menjadi salah satu dana yang menunjang pemilik UMKM. Subsidi mendukung UMKM dan Koperasi. Bentuk subsidi bisa Materi, Uang,

Kebutuhan sembako, Barang hingga keringanan biaya. Biasanya, golongan yang menjadi penerima subsidi adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Subsidi yang di berikan pemerintah ini bersumber dari pajak. Jadi, uang pajak yang dipungut oleh pemerintah kembali lagi ke dalam lingkup masyarakat melalui pemberian subsidi (Anugrah, 2022).

## 2.6 Peneitian Terkait

Penelitian sebelumnya akan menjadi suatu acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperluas teori untuk mengkaji penulisan yang dilakukan. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dapat di tulis sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

NO	Nama Peneliti dan Judul	Metode dan Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Husniyah, Nazaruddin dan Mustofa (2022) Dampak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Sibolga	Kuantitatif Variabel bebas yaitu dampak UMKM dan pengangguran Variabel terikat yaitu kemiskinan	Dampak UMKM memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan	Sama-sama meneliti tentang UMKM terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian terdahulu meneliti tentang UMKM, pengangguran. penelitian sekarang meneliti tentang kebijakan UMKM dan subsidi.

**Tabel 2.1 Lanjutan**

2	Adhipramana & Taufiq (2022) Pengaruh Subsidi Pendidikan dan Subsidi Beras Miskin terhadap Kemiskinan di Kota Surabaya	Kuantitatif Variabel bebas yaitu subsidi pendidikan dan subsidi beras miskin Variabel terikat yaitu kemiski	Pemberian subsidi beras miskin tidak memberikan pengaruh secara Signifikan. Sedangkan Pemberian subsidi pendidikan berpengaruh untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kota Surabaya	Sama-sama meneliti tentang kemiskinan. Penelitian terdahulu meneliti tentang subsidi pendidikan, subsidi beras miskin di kota Surabaya. penelitian sekarang meneliti tentang UMKM dan subsidi di indonesia.
3	Annisa Dewi Pusparani (2022) Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Subsidi Dengan Tingkat Kemiskinan	Kuantitatif Variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan subsidi Variabel terikat yaitu Tingkat kemiskinan	pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran subsidi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	Sama-sama meneliti tentang kemiskinan. Penelitian terdahulu meneliti tentang pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan subsidi. penelitian sekarang meneliti tentang UMKM dan subsidi.
4	Martha Carolina (2022) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di	Kuantitatif Variabel bebas yaitu jumlah pengeluaran pemerintah di	Subsidi berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.	Penelitian terdahulu meneliti tentang pengeluaran pemerintah di

**Tabel 2.1 Lanjutan**

	Bidang Subsidi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan	bidang subsidi, pendidikan dan kesehatan Variabel terikat jumlah masyarakat miskin di indonesia (kemiskinan)	Hasil ini menunjukkan bahwa anggaran subsidi yang diberikan pemerintah kurang tepat sasaran mengurangi kemiskinan. Dibidang Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan. Dibidang Kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.	bidang subsidi, pendidikan dan kesehatan penelitian sekarang meneliti tentang UMKM dan subsidi.
5	Anugerah & Nuraini (2021) Peran UMKM Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur	Kuantitatif Variabel bebas yaitu jumlah UMKM dan tenaga kerja sektor UMKM Variabel terikat yaitu kemiskinan	Jumlah UMKM di Jawa Timur berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur. sedangkan Jumlah tenaga kerja sektor UMKM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur.	Sama-sama meneliti tentang Kemiskinan. Penelitian terdahulu meneliti tentang UMKM dan tenaga kerja sektor umkm. penelitian sekarang meneliti tentang UMKM dan subsidi
6	Widowati & Purwanto (2019) Pengaruh UMKM Terhadap Tingkat Kemiskinan	Kuantitatif Variabel bebas yaitu UMKM, Tenaga Kerja, Pendapatan Domestik	Jumlah UMKM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap sumbangan PDB	Sama-sama meneliti tentang Kemiskinan. Penelitian terdahulu

**Tabel 2.1 Lanjutan**

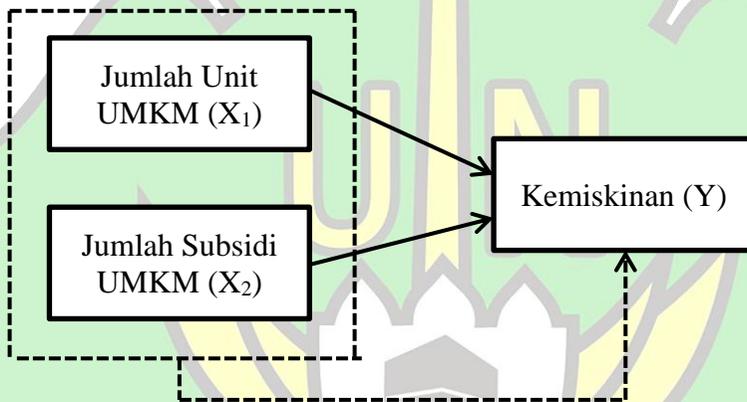
	Dengan Pendapatan Domestik Bruto Sebagai Intervening	Bruto Variabel terikatnya Tingkat Kemiskinan	UMKM. sedangkan Jumlah UMKM berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.	Membahas tentang UMKN, tenaga kerja, dan pendapatan domestik bruto. Penelitian sekarang Membahas tentang UMKM dan subsidi.
7	Misdawita & Sari (2013) Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan di Indonesia	Kuantitatif Variabel bebas Pendidikan, Kesehatan, subsidi Variabel terikatnya Kemiskinan	di bidang pendidikan memiliki dampak yang negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan. di bidang kesehatan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan. Sedangkan untuk subsidi memiliki dampak yang negatif namun tidak signifikan yang berarti bahwa pengeluaran subsidi tidak memiliki dampak yang berarti bagi penurunan angka kemiskinan di Indonesia.	Sama-sama meneliti tentang kemiskinan. Penelitian terdahulu meneliti tentang pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan pengeluaran subsidi. penelitian sekarang meneliti tentang UMKM dan subsidi.

*Sumber: Data Diolah (2022)*

## 2.7 Kerangka Berpikir

Memperhatikan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka pada bagian ini akan diuraikan hal-hal yang dijadikan penulis sebagai landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



*Sumber: Desain Peneliti (2022)*

Keterangan :

—————> : Secara Parsial

- - - - -> : Secara Simultan

## 2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan (Kuncoro, 2013). Jadi hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berdasarkan rumusan masalah dan

kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H<sub>01</sub>: Diduga UMKM berpengaruh negatif terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia

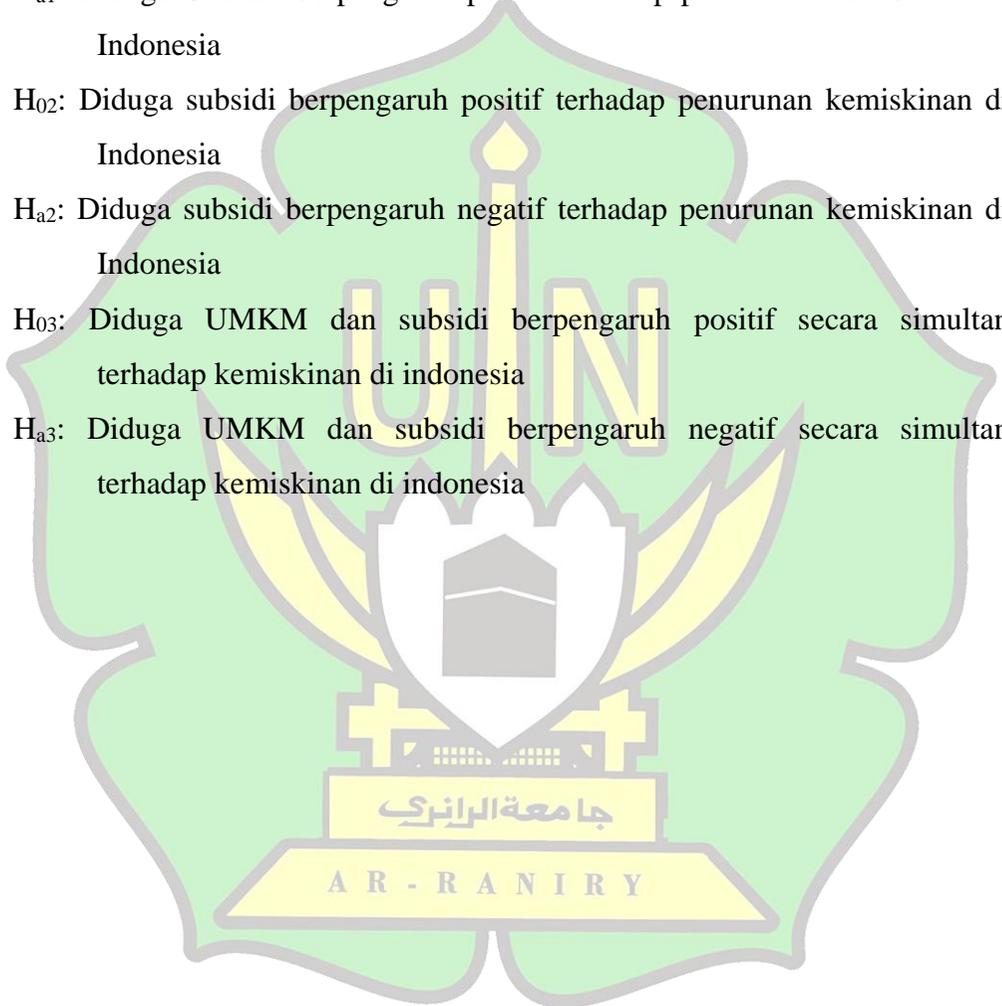
H<sub>a1</sub>: Diduga UMKM berpengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia

H<sub>02</sub>: Diduga subsidi berpengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia

H<sub>a2</sub>: Diduga subsidi berpengaruh negatif terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia

H<sub>03</sub>: Diduga UMKM dan subsidi berpengaruh positif secara simultan terhadap kemiskinan di Indonesia

H<sub>a3</sub>: Diduga UMKM dan subsidi berpengaruh negatif secara simultan terhadap kemiskinan di Indonesia



## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif bisa diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji sampel atau populasi tertentu, pengumpulan data mempergunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, bermaksud untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2017). Jenis studi ini menggunakan pendekatan asosiatif yang bermaksud untuk mencari pengaruh antara suatu variabel ataupun lebih kepada variabel yang lain.

#### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dihimpun dari Lembaga-lembaga pemerintah atau swasta baik secara langsung ataupun tidak langsung (Ridwan, 2020). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yang berbentuk tahunan dengan periode waktu dari tahun 1998 hingga tahun 2021. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah UMKM, dan Jumlah Subdisi umkm di Indonesia dari periode tahun 1998-2021 (24 tahun). Data yang diperoleh bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian diperoleh melalui metode dan teknik pengumpulan data melalui Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur, buku, jurnal-jurnal dan media lain yang mempunyai kaitan

dengan masalah dan tema penelitian. Teknik dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti, yaitu jumlah penduduk miskin, jumlah UMKM, dan jumlah subsidi di Indonesia.

### 3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis variabel sendiri dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek lain.

#### 3.4.1 Klasifikasi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Kemiskinan sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Jumlah Unit UMKM dan jumlah Subsidi UMKM. Berdasarkan klasifikasi dari variabel yang telah dijelaskan di atas, maka selanjutnya akan diuraikan beberapa definisi operasional dari dua variabel di atas adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Indikator
1	Kemiskinan (Y)	Data kemiskinan merupakan data jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam bentuk tahunan dari periode 1998-2021. Yang bersumber dari BPS, dinyatakan dalam satuan juta.

**Tabel 3.1 Lanjutan**

2	UMKM ( $X_1$ )	Data jumlah UMKM adalah data Unit UMKM keseluruhan di Indonesia dalam bentuk tahunan dari periode 1998-2021. Yang bersumber dari BPS, dinyatakan dalam satuan juta.
3	Subsidi UMKM ( $X_2$ )	Data subsidi merupakan data jumlah pengeluaran subsidi UMKM keseluruhan di Indonesia dalam bentuk tahunan dari periode 1998-2021. Yang bersumber dari BPS, dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.

*Sumber: Data Diolah (2022)*

### 3.5 Metode Analisis Data

#### 3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu Jumlah Unit UMKM ( $X_1$ ) dan Jumlah Subsidi Umkm ( $X_2$ ) terhadap variabel terikat yaitu Kemiskinan ( $Y$ ). Dalam analisis ini menggunakan bantuan program Eviews. Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (3.1)$$

Keterangan :

$Y$  = Kemiskinan

$a$  = konstanta

$b_1$  = koefisien regresi untuk  $x_1$

$b_2$  = koefisien regresi untuk  $x_2$

$X_1$  = Jumlah UMKM

$X_2$  = Jumlah Subsidi umkm

$e$  = Variabel Pengganggu, error term

### **3.6 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah ada masalah didalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas ( $X$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan kedua variabel tersebut. Model asumsi klasik digunakan karena penelitian ini menggunakan analisa regresi. Model asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah:

#### **3.6.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk memastikan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Dalam menguji normalitas peneliti menggunakan uji Jarque-Bera, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai Prob. Jarque Bera dari hasil perhitungan data  $> 5\%$ , artinya data berdistribusi secara normal.
- b. Jika nilai Prob. Jarque Bera dari hasil perhitungan data  $< 5\%$ , artinya data tidak berdistribusi secara normal.

#### **3.6.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bermaksud melihat atau menguji suatu model regresi apakah terdapat korelasi atau hubungan sempurna antara variabel independen dalam persamaan regresi. Model regresi yang baik harusnya tidak memiliki korelasi diantara variabel independen. Cara menemukan adanya multikolinieritas dengan melakukan:

- a. Jika nilai koefisien korelasi  $< 0,80$  maka tidak terjadi masalah multikolinieritas.
- b. Jika nilai koefisien korelasi  $> 0,80$  maka terjadi masalah multikolinieritas.

### 3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas, kesalahan yang terjadi tidak acak (random) tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas untuk semua pengamatan sama maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

- a. Jika P-Value  $> \alpha$  (5%) maka tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas
- b. Jika P-Value  $< \alpha$  (5%) maka terjadi masalah Heteroskedastisitas

### 3.6.4 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara residual pada periode  $t$  (saat ini) dengan residual periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dengan menggunakan uji LM dimana dasar pengambilan keputusan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Prob. *Chi-square*  $> \alpha$  (5%) maka tidak terjadi masalah autokorelasi
2. Jika Prob. *Chi-square*  $< \alpha$  (5%) maka terjadi masalah autokorelasi

### 3.7 Pengujian Hipotesis

#### 3.7.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Uji T bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel dependen lainnya dianggap konstan (tetap). Uji T dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-statistik dengan nilai t-tabel, dimana :

- a. Jika nilai t-hitung  $>$  t-tabel dengan nilai signifikansi  $\alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).
- b. Jika nilai t-hitung  $<$  t-tabel dengan nilai signifikansi  $\alpha$  (0,05) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

#### 3.7.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen, dengan cara membandingkan antara nilai F-hitung dengan nilai F-tabel dimana:

- a. Jika nilai F-hitung  $>$  F-tabel dengan nilai signifikansi  $\alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai F-hitung  $<$  F-tabel dengan nilai signifikansi  $\alpha$  (0,05) maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.7.3 Koefisien Determinasi $R^2$

Koefisien determinasi  $R^2$  merupakan indikator yang berguna untuk menjelaskan besarnya variasi dalam model dan bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan suatu model dalam menjelaskan variabel terikat (dependen).

- a. Nilai koefisien determinasi mendekati 1, artinya variabel bebas (independen) dapat menjelaskan variabel terikat (dependen).
- b. Nilai koefisien determinasi mendekati 0, maka variabel bebas (independen) hanya sedikit menjelaskan variabel terikat (dependen).

Dari nilai  $R^2$  kita bisa mengetahui tingkat signifikansi suatu hubungan diantara variabel bebas dan variabel tak bebas dalam regresi linier.



## **BAB IV**

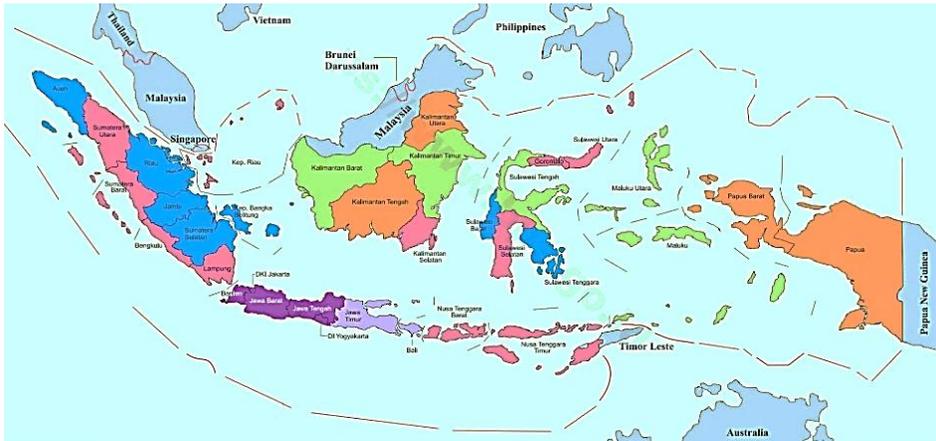
### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, dimana secara astronomis Indonesia terletak antara  $6^{\circ} 04' 30''$  LU (Lintang Utara) dan  $11^{\circ} 00' 36''$  LS (Lintang Selatan) dan antara  $94^{\circ} 58' 21''$  sampai dengan  $141^{\circ} 01' 10''$  BT (Bujur Timur). Data kependudukan yang dikeluarkan BPS Indonesia (2022) menyebutkan hingga saat ini total penduduk mencapai 275,77 juta jiwa menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Banyaknya penduduk di Indonesia sangat berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia yaitu menentukan sejauh mana kebijakan pemerintah dapat mengatasi kemiskinan seperti pemberian bantuan modal kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan penyaluran subsidi yang dapat menggambarkan kesejahteraan bagi penduduknya.

Sebagaimana telah dilakukan dalam dua puluh empat tahun terakhir, jumlah UMKM di Indonesia perlu didorong untuk terus tumbuh dan berkembang, baik dari usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah. Bisnis UMKM menjadi pilihan masyarakat untuk keluar dari situasi ekonomi berat sekaligus menjadi penggerak roda perekonomian secara global di Indonesia meskipun masih dalam taraf usaha mikro. Selain itu, penyaluran subsidi juga dapat mendukung usaha kecil, mikro dan menengah sekaligus mendorong penurunan kemiskinan di Indonesia. Penyaluran subsidi yang sering dilakukan pemerintah berupa subsidi BBM agar bermanfaat bagi masyarakat yang lebih membutuhkan serta melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin dari dampak kenaikan harga pangan dan energi.

**Gambar 4.1 Peta Indonesia**



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

#### 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode statistika yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penyebaran dari seluruh variabel penelitian yang dapat memberikan gambaran dan ukuran terhadap data dalam bentuk numerik yang berlaku secara umum dan akan digunakan sebagai data penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai statistik deskriptif variabel tingkat kemiskinan, UMKM dan subsidi sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	Kemiskinan	UMKM	Subsidi
Mean	33.37167	52.79333	141.1408
Median	31.77500	53.29500	77.69000
Maximum	49.50000	65.47000	694.2600
Minimum	25.14000	36.81000	25.72000
Std. Dev	6.588560	9.663046	165.3672
Observations	24	24	24

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Kemiskinan tertinggi di Indonesia yang ditandai dengan tingginya jumlah penduduk miskin selama 24 tahun (1998-2021) terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 49,50 juta jiwa, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi dan politik. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut mengakibatkan industri besar dan sedang berkurang drastis dan jumlah tenaga kerja menurun sehingga pendapatan masyarakat berkurang dan daya beli masyarakat menurun. Jumlah kemiskinan terendah di Indonesia berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 25,14 juta, dimana turunnya kemiskinan dipicu oleh kenaikan upah, penurunan harga eceran dan peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita. Rata-rata jumlah kemiskinan di Indonesia selama periode tersebut sebesar 33,37 juta jiwa.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tertinggi di Indonesia sepanjang periode penelitian terjadi di tahun 2019 sebesar 65,47 juta unit usaha dan UMKM terendah di tahun 1997 yaitu sebesar 36,81 juta jiwa. Pada tahun 2019 adalah awal mulainya terjadi pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan *social distancing*. Tentu saja banyak tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM, salah satunya terjadi perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dari *offline* ke *online*. Namun, perubahan pola tersebut membuat para pelaku UMKM bertahan agar berkembang sehingga mampu menghadapi kondisi *new normal*. Oleh karena itu, para pelaku UMKM melakukan penjualan *online* karena lebih kuat dibandingkan penjualan secara *offline*, dan hingga saat ini UMKM terus bertambah artinya para pelaku UMKM sudah beradaptasi dengan perkembangan pasar. Sementara, pada tahun 1998 jumlah UMKM di Indonesia masih tergolong kecil dibandingkan tahun sesudahnya. Namun, sebenarnya UMKM menjadi penyelamat ekonomi nasional ketika banyak usaha besar yang kolaps pada saat terjadi krisis moneter. Tergolong kecil artinya UMKM setiap tahunnya

mengalami perkembangan yang pesat. Secara rata-rata jumlah UMKM sepanjang 24 tahun sebesar 52,79 juta jiwa, angka ini tergolong tinggi karena di awal tahun periode penelitian hingga saat ini (2021) pemerintah menjadikan UMKM sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus berperan dalam mengurangi angka kemiskinan.

Rata-rata subsidi yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk membantu meringankan konsumsi masyarakat rentan miskin dan untuk mendukung perkembangan UMKM sebesar Rp 141,14 miliar dengan kisaran subsidi terendah pada angka Rp 25,72 miliar di tahun 2013 dan subsidi tertinggi sebesar Rp 694,26 miliar pada tahun 2015. Penyaluran subsidi terkadang menyebabkan ketimpangan, dimana masyarakat kaya dengan daya beli yang lebih besar dapat mengakses manfaat subsidi lebih banyak sementara masyarakat rentan miskin lebih sedikit yang mendapat manfaat dari subsidi tersebut. Ketepatan sasaran dalam penyaluran subsidi menjadi salah satu prioritas utama yang dilakukan pemerintah. Hal ini menyebabkan terjadinya reformasi subsidi pada tahun 2015 dimana telah mengalihkan belanja konsumtif ke belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

#### **4.3 Kemiskinan**

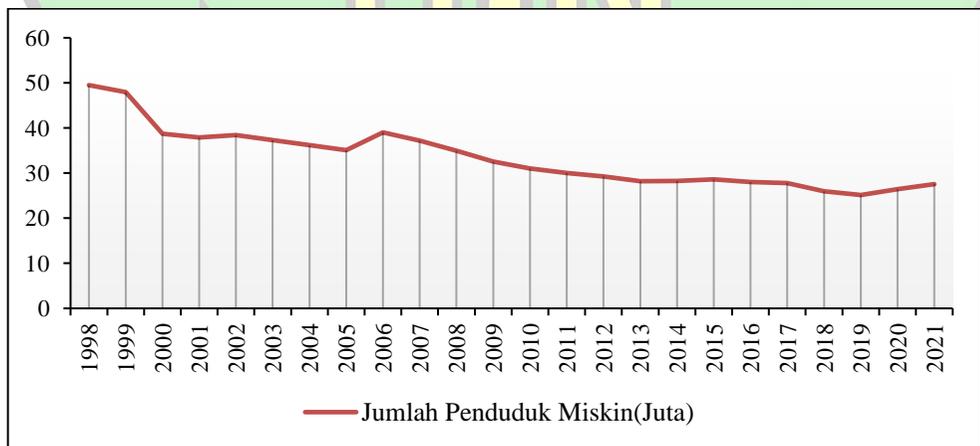
Kemiskinan merupakan keadaan tidak mampu seseorang dalam mencukupi kebutuhan berupa uang dan barang untuk kelangsungan hidup, dimana saat ini kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa masalah seperti jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya mengakibatkan bertambahnya angkatan kerja yang tumbuh cepat namun tidak diikuti dengan bertambahnya lapangan kerja. Kemudian kualitas sumber daya manusia di Indonesia saat ini masih tergolong rendah, dimana menurut data BPS menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah yaitu sebesar 39,10 persen. Belum lagi angka kemiskinan

melonjak tinggi ditengah pandemi covid yang terjadi sepanjang 2020 hingga awal 2021 menyebabkan 75 persen rumah tangga mengalami penurunan pendapatan dan 66 persen rumah tangga yang memiliki usaha kecil juga mengalami penurunan jumlah pembeli dan omset usaha. Lebih lanjut pandemi covid membuat angka pengangguran meningkat sebesar 2,7 juta orang dan pada saat yang sama rata-rata upah nominal pekerja dan buruh mengalami penurunan sebesar -5,2 persen dari upah nominal sebelum pandemi. Efek kemiskinan menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, dimana jika ditinjau melalui pengeluaran rumah tangga dapat menggambarkan daya beli rumah tangga yang sebenarnya atau kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kesejahteraan dapat berkurang karena rata-rata pengeluaran rumah tangga mengalami penurunan -1 persen sampai -1,6 persen. Walaupun pengeluaran rumah tangga di perkotaan relatif lebih besar dibandingkan pengeluaran rumah tangga di perdesaan.

Masalah kemiskinan di Indonesia dari zaman kepemimpinan Soeharto hingga saat ini menjadi isu strategis dan juga fokus utama untuk dihadapi dan harus ditangani. Berbagai macam pengeluaran pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yaitu program perlindungan sosial dan subsidi yang digunakan untuk mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan, selanjutnya pemberdayaan UMKM dimana pemerintah memperluas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB). Serta, pengembangan Bank Wakaf Mikro, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk menjangkau usaha mikro dan kecil. Keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan telah dilakukan salah satunya dengan pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) sebagai jenis usaha yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa penyaluran dana

subsidi kepada masyarakat yang sangat rentan miskin. Melalui kebijakan pemerintah berupa pemberdayaan UMKM dan subsidi dalam pengentasan kemiskinan, UMKM berperan besar bagi masyarakat yang sulit dalam ekonomi. Dimana, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa seiring dengan penambahan UMKM setiap tahunnya di Indonesia secara nyata dapat menurunkan kemiskinan. Namun, penyaluran subsidi belum sepenuhnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan, mengingat bahwa penyaluran subsidi belum tepat sasaran. Berikut adalah grafik jumlah penduduk miskin di Indonesia selama 24 tahun terakhir:

**Gambar 4.2 Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1998 - 2021**



Sumber: BPS yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) (2022)

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas diketahui bahwa jumlah penduduk miskin terendah di Indonesia berada pada tahun 2019 sebesar 25,14 juta. Kemudian, jumlah penduduk miskin tertinggi berada pada tahun 1998 sebesar 49,5 juta dimana pada tahun 1998 sampai 1999 terjadi resesi di Indonesia yang menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat. Selanjutnya, dimulai dari tahun 2008 sampai 2021 jumlah penduduk miskin mengalami

penurunan artinya pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, seperti adanya kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain sebagainya.

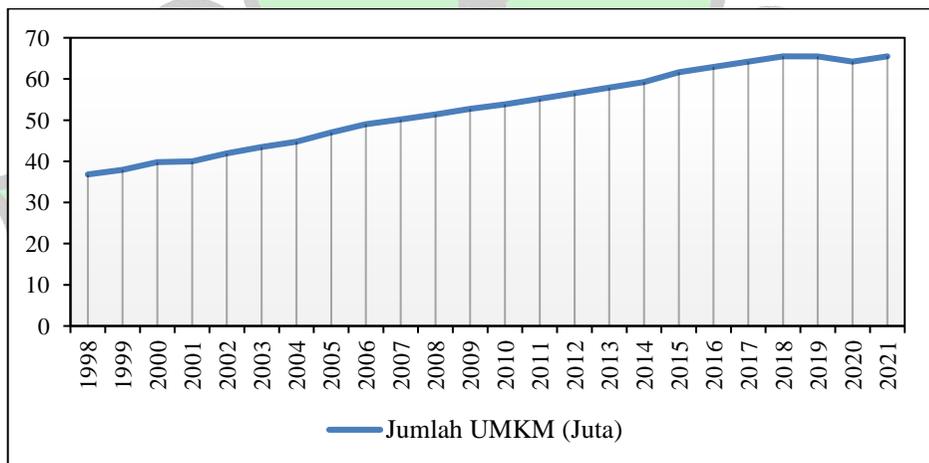
#### **4.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi sektor utama dalam perekonomian masyarakat, dimana UMKM adalah jenis usaha yang banyak digeluti oleh seluruh masyarakat di Indonesia, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi. Adanya UMKM menjadi peranan yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan karena dapat menciptakan lapangan kerja maupun dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akan mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang. Perkembangan UMKM ke arah positif mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia karena UMKM secara langsung dapat menyentuh perekonomian masyarakat. Dimana, sebagian masyarakat menjadikan UMKM sebagai sumber kesempatan kerja agar dapat meningkatkan penghasilan yang kemudian mampu memerangi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Pemulihan dan kinerja perekonomian sebagian disumbangkan oleh pemulihan UMKM, selain kesehatan dan perlindungan sosial. Hal ini karena pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan penting bagi perekonomian global, dimana UMKM dianggap sebagai tulang punggung perekonomian dunia. Saat ini Indonesia memiliki 64 juta UMKM dimana 99 persen dari total kegiatan bisnis dapat menyerap 97 persen lapangan kerja dan menyumbang 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Berkembangnya UMKM tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi misalnya kurangnya akses pasar, kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan

kurangnya penggunaan teknologi yang lebih maju. Namun pemerintah dapat mengatasi kelemahan tersebut seperti melakukan pembangunan infrastuktur yang tidak hanya berupa jalan tetapi juga membangun infrastruktur konektivitas digital, kemudian mengalokasikan anggaran yang cukup serta memberikan bantuan tambahan modal. Berikut adalah grafik Jumlah UMKM di Indonesia selama 24 tahun terakhir:

**Gambar 4.3 Grafik Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 1998 - 2021**



Sumber: BPS yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) (2022)

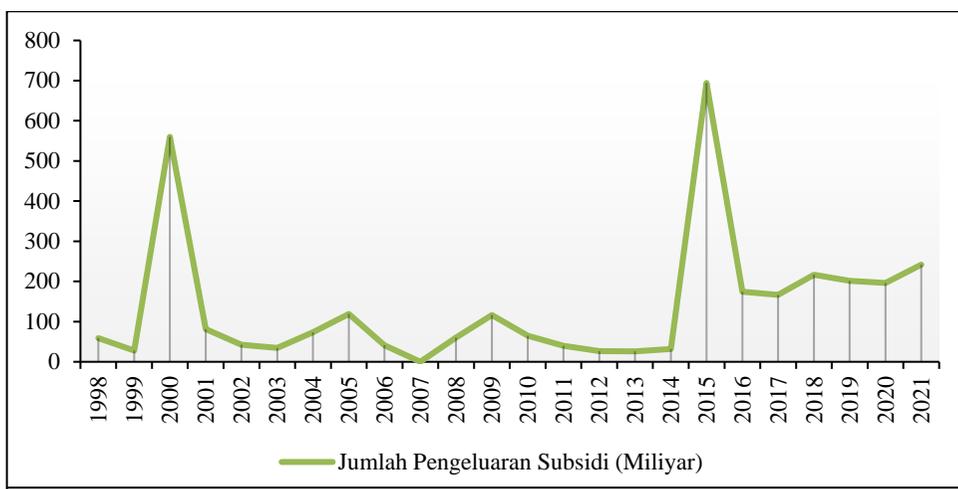
Berdasarkan Gambar 4.3 di atas diketahui bahwa jumlah UMKM di Indonesia selama 24 tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimana, pada tahun 1998 jumlah UMKM sebesar 36,81 juta terus meningkat hingga pada tahun 2021 jumlah UMKM sebesar 65,46 juta. Hal ini terjadi karena melalui kebijakan pemerintah yang menjadikan UMKM sebagai prioritas utama untuk dapat bersentuhan secara langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat baik secara individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Dimana, dampak dari kebijakan pemerintah tersebut memberikan efek positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

#### 4.5 Subsidi

Subsidi merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dimana subsidi bagian dari penerapan fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi, tumbuh dan berkembangnya perekonomian serta menyeimbangkan makro ekonomi di negara. Kebijakan subsidi ditujukan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah digunakan untuk dapat membayar produk atau jasa yang diterimanya dengan tarif dibawah harga pasar guna memenuhi kebutuhan ekonominya secara bertahap diharapkan dapat membaik. Disamping itu penyaluran dana subsidi dapat menunjang permodalan para pemilik UMKM sehingga dapat meningkatkan daya saing produksi, yang disalurkan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Subsidi BBM adalah salah satu jenis subsidi yang paling sering disalurkan oleh Pemerintah, mengingat bahwa penyaluran subsidi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi karena subsidi BBM sudah berlangsung sejak lama sehingga masyarakat sulit melepaskan diri dari ketergantungan subsidi BBM. Saat ini Pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 sebesar 502,4 triliun. Namun, pada kenyataannya subsidi BBM belum sepenuhnya dapat mengentas kemiskinan di Indonesia sehingga menyebabkan pemerintah melakukan pengalihan subsidi BBM dengan memberikan bantuan sosial yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah dan Bantuan Pemerintah Daerah. Berikut adalah grafik Jumlah Pengeluaran Subsidi di Indonesia selama 24 tahun terakhir:

**Gambar 4.4 Grafik Jumlah Pengeluaran Subsidi di Indonesia Tahun 1998– 2021**



*Sumber: BPS yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) (2022)*

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas diketahui bahwa jumlah pengeluaran subsidi selama 24 tahun terakhir di Indonesia berfluktuasi, dimana pada tahun 2000 dan 2015 jumlah pengeluaran subsidi terlihat sangat besar masing-masing sebesar 559,72 miliar dan 694,26 miliar. Artinya sebagian besar dana subsidi setiap tahunnya akan diberikan kepada masyarakat untuk menunjang para pemilik UMKM di Indonesia. Selain itu, perubahan besaran penyaluraan anggaran subsidi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan skema subsidi BBM, perubahan harga minyak dunia, perubahan subsidi listrik dan perubahan anggaran pajak DTP.

## **4.6 Analisis Hasil Penelitian**

### **4.6.1 Uji Asumsi Klasik**

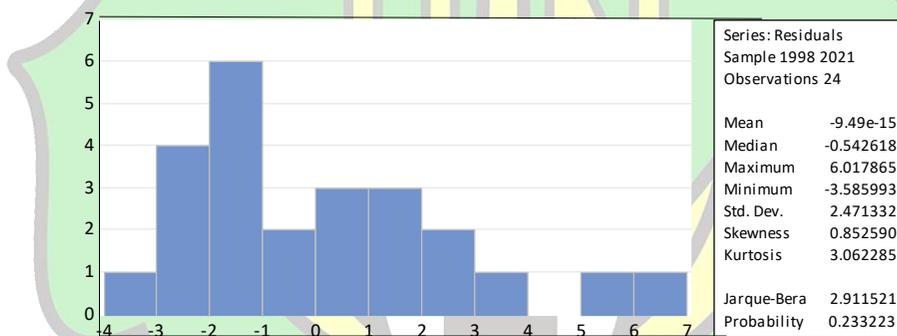
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah ada masalah di dalam data regresi dan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh UMKM dan

Subsidi terhadap Tingkat Kemiskinan. Dimana, uji ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### 4.6.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data dalam penelitian yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Dimana, data yang baik harus terdistribusi secara normal. Pada penelitian uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Berikut hasil uji normalitas:

**Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas**



Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Berdasarkan Gambar 4.5 menunjukkan bahwa nilai Jarque Bera dalam grafik sebesar 2,911 dengan probabilitas sebesar 0,233 artinya nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi (5%) yaitu  $0,233 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik variabel bebas maupun variabel terikat dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, maka data dalam penelitian ini secara residual berdistribusi normal dan layak digunakan.

#### 4.6.3 Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk menguji suatu model regresi apakah terdapat korelasi atau hubungan sempurna antara variabel independen dan dependen

dalam persamaan regresi. Dimana model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki masalah multikolinearitas di dalamnya. Berikut hasil uji multikolinieritas:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

	UMKM	S
UMKM	1.000000	0.238878
S	0.238878	1.000000

*Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)*

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel independen dibawah 0,80. Dimana, nilai untuk varibel UMKM ( $X_1$ ) dan Subsidi ( $X_2$ ) sebesar  $0,238878 < 0,80$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini.

#### 4.6.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk melihat varians variabel yang tidak sama untuk semua pengamatan. Model regresi yang baik apabila terjadi homokedastisitas di dalamnya, artinya kesalahan yang terjadi tidak acak (random) tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel independen untuk semua pengamatan yang sama. Berikut hasil uji heteroskedastisitas:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas – Glejser Test**

F-statistic	0.451029	Prob. F (2.20)	0.6433
Obs*R-squared	0.992597	Prob. Chi-Square (2)	0.6088
Scaled explained SS	0.958118	Prob. Chi-Square (2)	0.6194

*Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)*

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas diketahui hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *Glejser* menunjukkan hasil P-value  $Obs \cdot R\text{-squared}$  sebesar  $0,6088 > 0,05$  (5%), artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian.

#### 4.6.5 Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah di dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara residual periode saat ini dengan periode sebelumnya. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi masalah autokorelasi di dalamnya. Uji autokorelasi dengan menggunakan uji LM. Berikut hasil uji autokorelasi:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Autokorelasi – *Serial Correlation LM Test***

F-statistic	0.791571	Prob. F (2.20)	0.4683
Obs*R-squared	1.859368	Prob. Chi-Square (2)	0.3947

*Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)*

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas diketahui hasil uji autokorelasi menggunakan uji LM menunjukkan hasil Prob. *Chi-square* sebesar  $0,3947 > 0,05$  (5%), artinya tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi dalam penelitian.

#### 4.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan pengaruh dua variabel independen atau lebih (dalam penelitian UMKM dan Subsidi) terhadap satu variabel dependen (Kemiskinan), dimana apakah terdapat hubungan fungsional antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Berikut hasil analisis regresi linear berganda:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	66.69535	3.003777	22.20383	0.0000
UMKM	-0.629750	0.057473	-10.95727	0.0000
S	-0.000546	0.003358	-0.162614	0.8724

*Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)*

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil penelitian di atas dalam bentuk persamaan model regresi linear berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$K = 66.69535 - 0.629750UMKM - 0.000546S + \varepsilon$$

Keterangan:

K : Kemiskinan

UMKM : Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

S : Jumlah Subsidi

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang ditunjukkan pada tabel 4.5 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 66.695 artinya pengaruh kemiskinan di Indonesia sebesar 66.695 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
2. Nilai koefisien regresi variabel UMKM ( $X_1$ ) sebesar -0.629 artinya jika setiap penambahan jumlah UMKM sebesar 1 juta, maka akan menurunkan kemiskinan di Indonesia sebesar 0.629 juta dengan asumsi variabel lain tetap. Dimana jumlah UMKM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia selama periode 1998 – 2021.
3. Nilai koefisien regresi Subsidi ( $X_2$ ) sebesar -0.0005 artinya jika setiap penambahan penyaluran dana subsidi sebesar 1 miliar maka akan menurunkan kemiskinan di Indonesia sebesar 0,0005 dengan asumsi variabel lain tetap. Dimana subsidi memiliki pengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia selama periode 1998 – 2021.

## 4.8 Pengujian Hipotesis

### 4.8.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Uji ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu UMKM dan subsidi terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan. Kriteria pengujian dengan membandingkan nilai t-hitung (t-statistik) dengan t-tabel. Berikut hasil uji parsial (uji t):

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Parsial**

Variable	t-Statistik	Prob.
C	22.20383	0.0000
UMKM	-10.95727	0.0000
S	-0.162614	0.8724

*Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)*

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengaruh UMKM ( $X_1$ ) terhadap Kemiskinan (Y)

Diketahui bahwa variabel UMKM ( $X_1$ ) memperoleh nilai t-hitung sebesar 10,957 dan t-tabel sebesar 1,721 ( $10,957 > 1,721$ ) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  ( $\alpha$ ) artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara variabel UMKM ( $X_1$ ) dengan Kemiskinan (Y) di Indonesia selama periode 1998 - 2021.

b. Pengaruh Subsidi ( $X_2$ ) terhadap Kemiskinan (Y)

Diketahui bahwa variabel Subsidi ( $X_2$ ) memperoleh nilai t-hitung sebesar 0,162 dan t-tabel sebesar 1,721 ( $0,162 < 1,721$ ) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,872 > 0,05$  ( $\alpha$ ) artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Subsidi ( $X_2$ ) dengan Kemiskinan (Y) di Indonesia selama periode 1998 - 2021.

#### 4.8.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh dari seluruh variabel independen yaitu UMKM dan Subsidi secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu Kemiskinan. Berikut tabel hasil uji simultan (uji F):

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji F**

<i>F-statistic</i>	64.12910
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

*Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)*

Pada Tabel 4.7 di atas diketahui nilai F-hitung sebesar 64,129 dan F-tabel sebesar 3,467 yang diperoleh dari  $df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$  dan  $df_2 = n - k = 24 - 3 = 21$  (dimana k adalah jumlah variabel bebas maupun variabel terikat dan n adalah jumlah sampel). Nilai F-hitung  $>$  F-tabel ( $64,129 > 3,467$ ) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Maka,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya variabel UMKM ( $X_1$ ) dan Subsidi ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y).

### 4.8.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini dilakukan untuk menjabarkan hingga sejauh mana persentase variasi variabel dependen pada model regresi yang dijabarkan oleh variabel independennya. Berikut tabel hasil uji koefisien determinasi:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

R-squared	0.859304
Adjusted R-squared	0.845905

*Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)*

Pada Tabel 4.8 di atas diperoleh nilai R-squared sebesar 0.859304 atau 85,93%, artinya model ini mampu menjelaskan pengaruh variabel UMKM dan Subsidi terhadap Kemiskinan sebesar 85,93%, Sementara sisanya sebesar 14,07% dijelaskan diluar model dalam penelitian.

## 4.9 Pembahasan Penelitian

### 4.9.1 Pengaruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Kemiskinan

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, artinya jumlah UMKM yang semakin cepat bertambah menjadi salah satu cara dalam mengentaskan tingkat kemiskinan di Indonesia. Peran UMKM sangat penting karena menjadi salah satu sektor ekonomi potensial dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat terutama golongan menengah kebawah karena dapat menyerap tenaga kerja. Melalui kewirausahaan UMKM dapat menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun karakter bangsa yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat

kemiskinan. Sementara secara simultan UMKM dan subsidi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anugerah dan Nuraini (2021) yang menjelaskan secara parsial pertumbuhan UMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan artinya UMKM menjadi peluang masyarakat untuk mendapat kesempatan kerja dan pendapatan keluarga diduga sangat efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, dimana para pemilik UMKM dapat menjalankan usahanya sekaligus dapat memperkerjakan tenaga kerja maka dapat menurunkan angka kemiskinan serta dapat menciptakan kesejahteraan umum atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

#### **4.9.2 Pengaruh Subsidi Terhadap Kemiskinan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengeluaran subsidi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, artinya dana subsidi yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat dampaknya tidak terlalu besar terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran subsidi yang masih berfluktuatif naik turun dan hanya beberapa tahun saja pemerintah mengeluarkan dana subsidi yang besar untuk menjaga masyarakat miskin agar tetap mengakses terhadap pelayanan publik, pembangunan nasional dan sosial.

Selanjutnya, pengeluaran subsidi seharusnya mampu memberikan kontribusi terhadap kemiskinan, namun penyebab kurang optimalnya pengeluaran subsidi diduga karena pendistribusian yang kurang tepat sasaran. Artinya, pengeluaran subsidi masih belum adil secara merata, dimana subsidi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil merata namun pada faktanya subsidi lebih banyak diterima oleh masyarakat kelas menengah atas. Misalnya seperti subsidi listrik dan BBM banyak

dikonsumsi masyarakat kelas ekonomi menengah atas karena memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan masyarakat miskin seperti motor, mobil dan rumah yang dapat mengkonsumsi listrik dan BBM yang lebih besar (Khairi dan Aidar, 2018). Keadaan tersebut menjelaskan bahwa terjadi kesenjangan sosial, dimana masyarakat yang mampu semakin banyak mengkonsumsi subsidi yang diberikan pemerintah sementara masyarakat miskin semakin sedikit dan hampir tidak ada dalam mengkonsumsi segala jenis subsidi dari pemerintah. Selain itu, subsidi masih banyak digunakan untuk menunjang UMKM agar daya saing produksi dan permodalan UMKM menjadi lebih meningkat. Sementara secara simultan UMKM dan subsidi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Puspari (2022) yang menjelaskan bahwa subsidi berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan namun tidak secara signifikan, menunjukkan bahwa pengeluaran subsidi cenderung menurun dan belum secara merata disalurkan kepada masyarakat miskin. Dimana, ketidaksesuaian antara target dengan alokasi anggaran menyebabkan penyaluran subsidi belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat menengah bawah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis data dari keseluruhan data yang diperoleh maka diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara parsial Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, artinya jumlah UMKM yang semakin cepat bertambah menjadi salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
2. Secara parsial pengeluaran subsidi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, artinya dana subsidi yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat dampaknya tidak terlalu besar terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.
3. Variabel UMKM ( $X_1$ ) dan Subsidi ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y).

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, sehingga penulis mampu memberikan saran antara lain :

1. Pemerintah seharusnya tidak hanya memfokuskan pada UMKM saja untuk mengentaskan kemiskinan, namun harus juga di dukung dengan penyaluran subsidi yang berkesinambungan, Artinya dana subsidi disalurkan secara terpisah tidak disalurkan untuk kepentingan UMKM juga. Dengan demikian, semakin banyak subsidi yang disalurkan maka semakin nyata pula pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan. Adanya hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah melakukan upaya-

upaya untuk mengembangkan program UMKM dan subsidi. Kedua variabel ini memiliki dampak positif yang besar Kemiskinan.

2. Pemerintah Perlu adanya sosialisasi yang merata serta membuka informasi seluas-luasnya bagi UMKM di Indonesia terhadap program-program dan pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan UMKM sehingga masyarakat mampu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran dengan mengikuti program-program yang dijalankan oleh pemerintah.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian tentang kemiskinan. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain dalam melakukan penelitian terkait yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kemiskinan, seperti permodalan, pemasaran, pengembangan kewirausahaan, pengembangan keterampilan dan sebagainya, dengan demikian mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awalil Rizky, Strategi Jitu Invetasi di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia, *Makalah Launching & Seminar BMT Permodalan* (Jakarta: BMT Permodalan, 2012), h. 50
- Abduh, Thamrin. (2017). *Strategi Internasionalisasi UMKM*. CV Sah Media. Makassar
- Achmad Maqsudi. (2021). *Pengertian UMKM Dan Pendaftaran Merek*. Surabaya
- Anugrah Stephen Soen. DKK (2022). Subsidi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*. 21(1): 84-92
- Ali, Mohammad Daud. , (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. 1, UI-Press, Jakarta
- Adepoju, Razaq Idowu, dan Oyekolade Sodiq Oyesanya, (2014), A Critical Analysis of Poverty Alleviation Strategies of AlHayat Relief Foundation in Nigeria, *Journal of Islamic Finance*, 3 (2)
- Baiq Tisniwati. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 10(1): 33-46
- Darminto Hartono (2015). *Eksistensi Pembentukan Lembaga Pemeringkat Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*. Universitas Diponegoro. 44(4): 462-472
- Darwanto, D., Raharjo, S. T., and Hendra, A. (2015). Pengembangan produksi usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) sektor pertanian berbasis potensi lokal. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)*, 1(2).
- Dungtji Munawar (2013), *Memahami pengertian dan Kebijakan subsidi dalam APBN, Kemenkeu*
- Gunawan, H. M. (2014). *Pemberdayaan Umkm dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Daerah: Sebuah Telaah Konsep*.

- Hemas Citra Maharani & Jaeni. (2021). Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 16(1): 26-39
- Hossain, S. (2007). Poverty and vulnerability in urban Bangladesh: the case of slumcommunities in Dhaka City. *International Journal of Development Issues*, 6(1), 50-62.
- Ibnu. (2021, Match 31). Subsidi Adalah: Pengertian, Jenis dan Dampaknya untuk Perekonomian. *Diambil kembali dari Accurate: <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/subsidi-adalah/>*
- Indonesia, K. K. (2015). APBN 2015. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2015>
- Indonesia, K. K. (2016). APBN 2016. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>
- Indonesia, K. K. (2017). APBN 2017. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>
- Indonesia, K. K. (2018). APBN 2018. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Indonesia, K. K. (2019). APBN 2019. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Indonesia, K. K. (2020). APBN 2020. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin. PP Nomor 42 Tahun 1981.
- Indonesia. Undang-undang tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. UU Nomor 4 Tahun 1965.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. PP Nomor 31 Tahun 1980.
- Indonesia. Undang-undang tentang Rumah Susun. UU Nomor 16 Tahun 1985.
- Indonesia. Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat. UU Nomor 38 Tahun 1999.

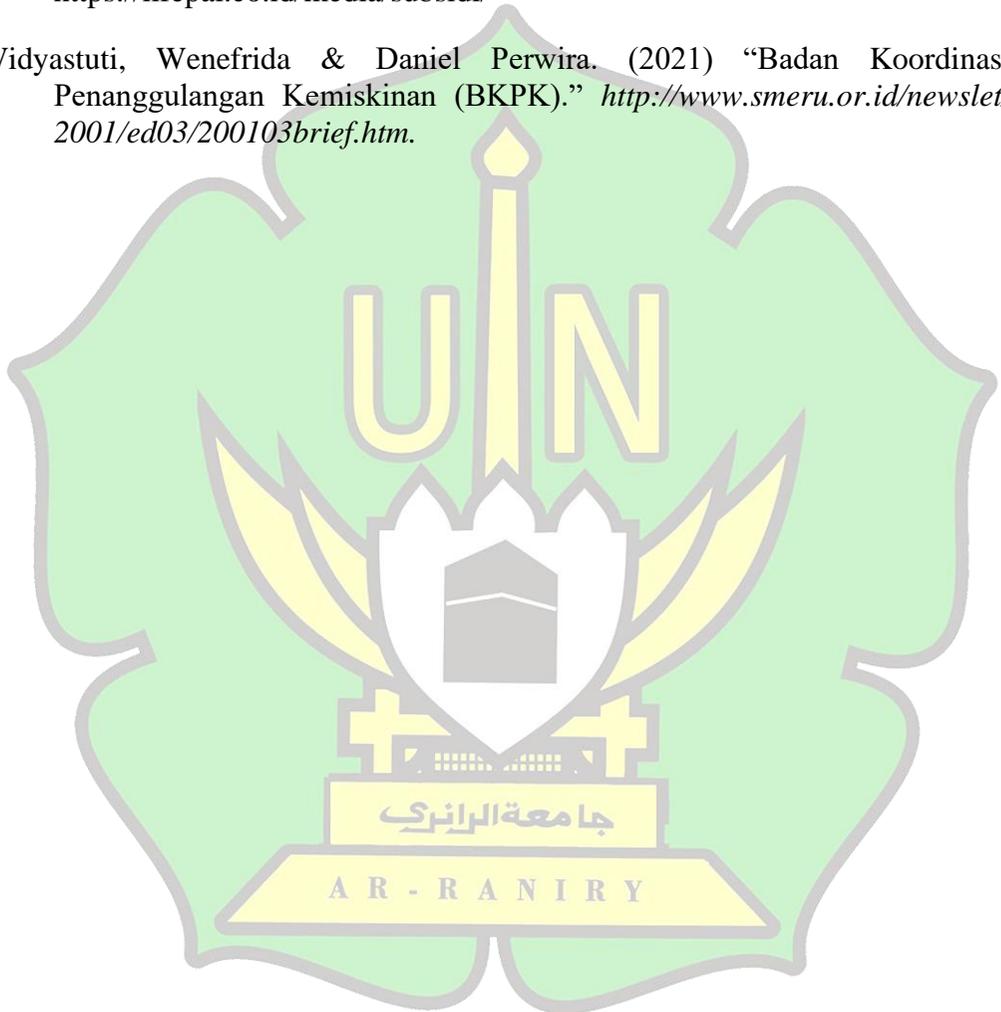
- Indonesia. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi & Tugas Lembaga Pemerintah Non-Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2001.
- Indonesia, Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
- Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 2001 jo. Nomor 8 Tahun 2002 jo. Nomor 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan
- Komite Penanggulangan Kemiskinan, "Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan", Cet. 5, Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Liedholm, C., & Mead, D. (1988). Small-scale Enterprises: A *Profil. Economic Impact*, 63. 12-17.
- Muhammad Wahyu Khairi. (2018). Pengaruh Subsidi Energi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 3(3): 359-369
- Mujahidin dan Ananda Mahardika. (2017). *Perempuan Dan Kemiskinan: Strategi Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga*. UMSU Press
- Murdiyana & Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintah*. 10(1): 73-96
- Mudrajad Kuncoro, (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Megasari, Handayani. (2015). *Analisis Perekomunian Dan Kemiskinan di Indonesia*.
- Nugroho, Y. A. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Mengelola SDM Secara Profesional (1st ed.)*. (A. Yuwono, Ed.) Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

- Nurul Amelia Sari. (2019). *Pengaruh Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Pendaftaran Pelaku Usaha UMKM di Kota Makassar*. Universitas Negeri Makassar
- Republik Indonesia, 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM
- Ridwan, M. (2020). *Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam & Lingkungan*. Yogyakarta: BILDUNG.
- Rukiah & Ulan. (2022). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*. 8(1): 73-86
- Sari, Sindi Paramita, (2016), *Analisis PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013*. I-Economic, 2 .(1):86 – 101.
- Saragih, I dan Nasution, S. (2015). Analisis Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 19(1):1-7.
- Sugiri, Dani. (2020). *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19*. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi 19.
- Suryahadi, Asep & Sudarno Sumarto. *Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia*. <http://www.smeru.or.id/newsletter/2001/ed03/200103data.htm>.
- Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. (2014). Strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi pasar Bebas ASEAN. *Jurnal Keuangan & Moneter*, 16(1), 1–20.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Bisnis* . Bandung: Alfabeta

Vina Natasya & Pancawati Herdiningsih. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Journal of Economics and Business*. 5(1): 141-148

Wardana, R. (2020, October 20). *Pengertian Subsidi Dan Contoh Kebijakan Subsidi Di Indonesia* . Diambil kembali dari Lifepal: <https://lifepal.co.id/media/subsidi/>

Widyastuti, Wenefrida & Daniel Perwira. (2021) “Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK).” <http://www.smeru.or.id/newslet/2001/ed03/200103brief.htm>.

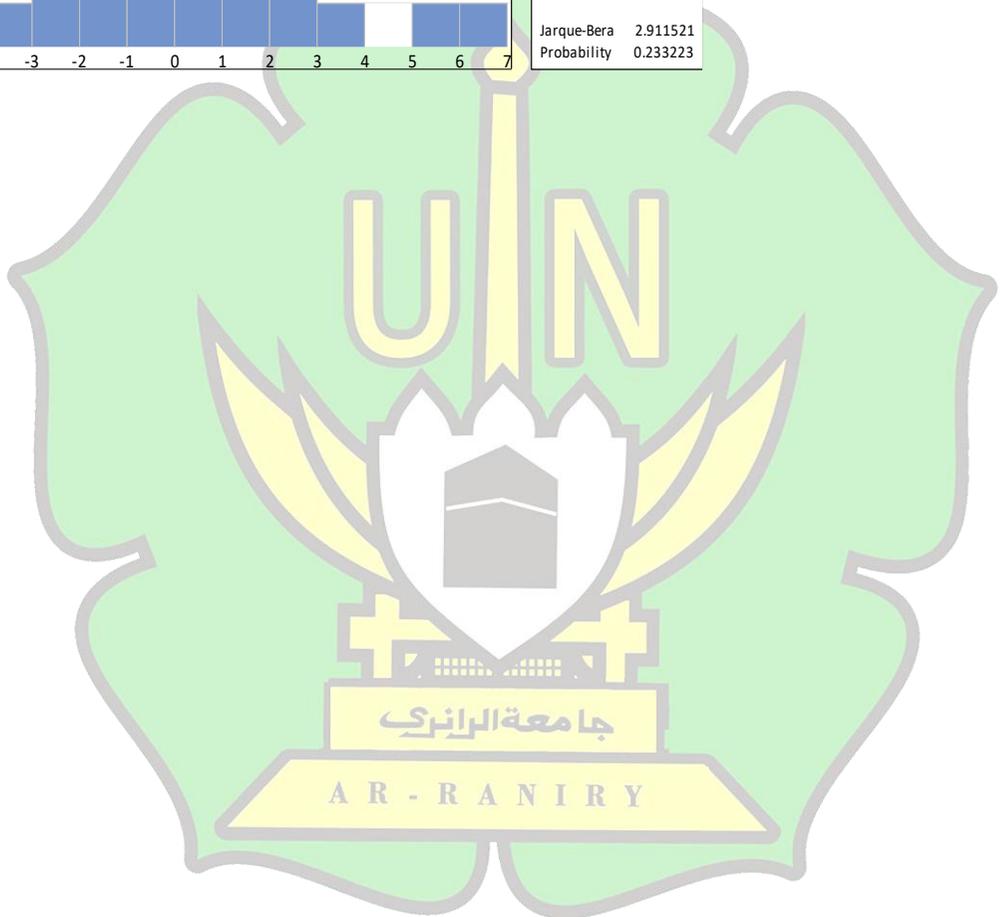
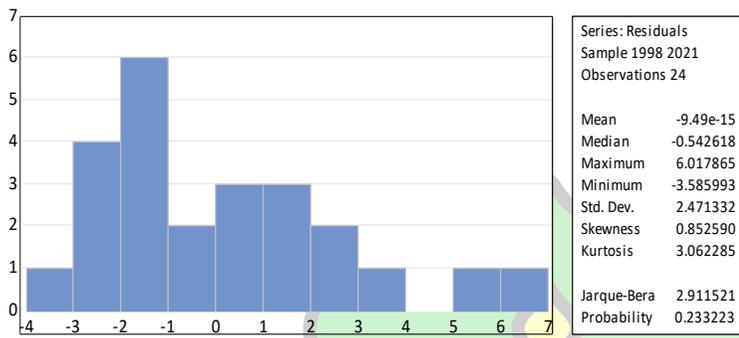


## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah UMKM dan Jumlah Pengeluaran Subsidi Tahun 1998-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin(Juta)	Jumlah UMKM (Juta)	Jumlah Subsidi Umkm (Miliyar)
1998	49,50	36,81	58,81
1999	47,97	37,91	28,02
2000	38,70	39,78	559,72
2001	37,90	39,96	81,57
2002	38,40	41,94	42,63
2003	37,30	43,46	34,73
2004	36,20	44,78	73,81
2005	35,10	47,02	119,09
2006	39,03	49,02	40,87
2007	37,17	50,14	91,22
2008	34,96	51,41	60,27
2009	32,53	52,77	116,48
2010	31,02	53,82	64,60
2011	30,02	55,20	39,55
2012	29,25	56,53	26,64
2013	28,17	57,89	25,72
2014	28,28	59,26	31,76
2015	28,59	61,65	694,26
2016	28,01	62,92	174,23
2017	27,77	64,19	166,40
2018	25,95	65,46	216,88
2019	25,14	65,47	201,80
2020	26,42	64,19	196,23
2021	27,54	65,46	242,09

## Lampiran 2. Uji Normalitas



### Lampiran 3. Uji Multikolinearitas

	UMKM	S
UMKM	1.000000	0.238878
S	0.238878	1.000000

### Lampiran 4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser  
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.451029	Prob. F(2,20)	0.6433
Obs*R-squared	0.992597	Prob. Chi-Square(2)	0.6088
Scaled explained SS	0.958118	Prob. Chi-Square(2)	0.6194

Test Equation:  
Dependent Variable: ARESID  
Method: Least Squares  
Date: 12/28/22 Time: 01:00  
Sample: 1999 2021  
Included observations: 23

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.088189	0.147867	0.596409	0.5576
NLOGUMKM	-0.041576	0.095242	-0.436532	0.6671
NLOGS	0.005910	0.006450	0.916363	0.3704

R-squared	0.043156	Mean dependent var	0.033498
Adjusted R-squared	-0.052528	S.D. dependent var	0.028163
S.E. of regression	0.028893	Akaike info criterion	-4.129333
Sum squared resid	0.016696	Schwarz criterion	-3.981225
Log likelihood	50.48733	Hannan-Quinn criter.	-4.092084
F-statistic	0.451029	Durbin-Watson stat	2.138681
Prob(F-statistic)	0.643294		

## Lampiran 5. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.791571	Prob. F(2,18)	0.4683
Obs*R-squared	1.859368	Prob. Chi-Square(2)	0.3947

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/28/22 Time: 01:01

Sample: 1999 2021

Included observations: 23

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.001043	0.242639	0.004300	0.9966
NLOGUMKM	0.004191	0.156464	0.026788	0.9789
NLOGS	-0.004154	0.011027	-0.376685	0.7108
RESID(-1)	0.284846	0.249079	1.143596	0.2678
RESID(-2)	-0.187591	0.241739	-0.776005	0.4478
R-squared	0.080842	Mean dependent var		-6.80E-16
Adjusted R-squared	-0.123415	S.D. dependent var		0.044343
S.E. of regression	0.046999	Akaike info criterion		-3.087704
Sum squared resid	0.039761	Schwarz criterion		-2.840857
Log likelihood	40.50860	Hannan-Quinn criter.		-3.025623
F-statistic	0.395785	Durbin-Watson stat		1.964558
Prob(F-statistic)	0.809001			

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

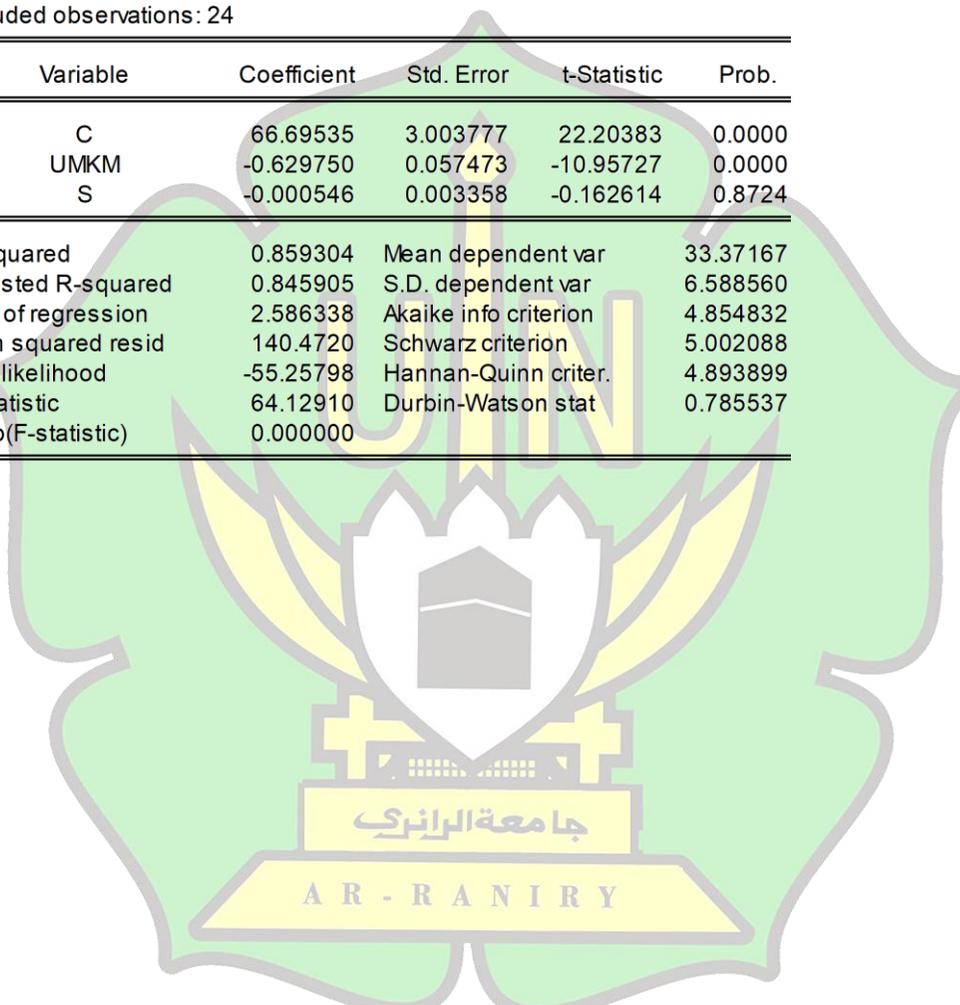
## Lampiran 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: TK  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/28/22 Time: 00:55  
 Sample: 1998 2021  
 Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.69535	3.003777	22.20383	0.0000
UMKM	-0.629750	0.057473	-10.95727	0.0000
S	-0.000546	0.003358	-0.162614	0.8724

R-squared	0.859304	Mean dependent var	33.37167
Adjusted R-squared	0.845905	S.D. dependent var	6.588560
S.E. of regression	2.586338	Akaike info criterion	4.854832
Sum squared resid	140.4720	Schwarz criterion	5.002088
Log likelihood	-55.25798	Hannan-Quinn criter.	4.893899
F-statistic	64.12910	Durbin-Watson stat	0.785537
Prob(F-statistic)	0.000000		



## Lampiran 7. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	TK	UMKM	S
Mean	33.37167	52.79333	141.1408
Median	31.77500	53.29500	77.69000
Maximum	49.50000	65.47000	694.2600
Minimum	25.14000	36.81000	25.72000
Std. Dev.	6.588560	9.663046	165.3672
Skewness	0.880799	-0.162711	2.280998
Kurtosis	3.173241	1.703950	7.626443
Jarque-Bera	3.133237	1.785646	42.21578
Probability	0.208750	0.409498	0.000000
Sum	800.9200	1267.040	3387.380
Sum Sq. Dev.	998.4097	2147.612	628964.8
Observations	24	24	24

## Lampiran 8. T-Tabel

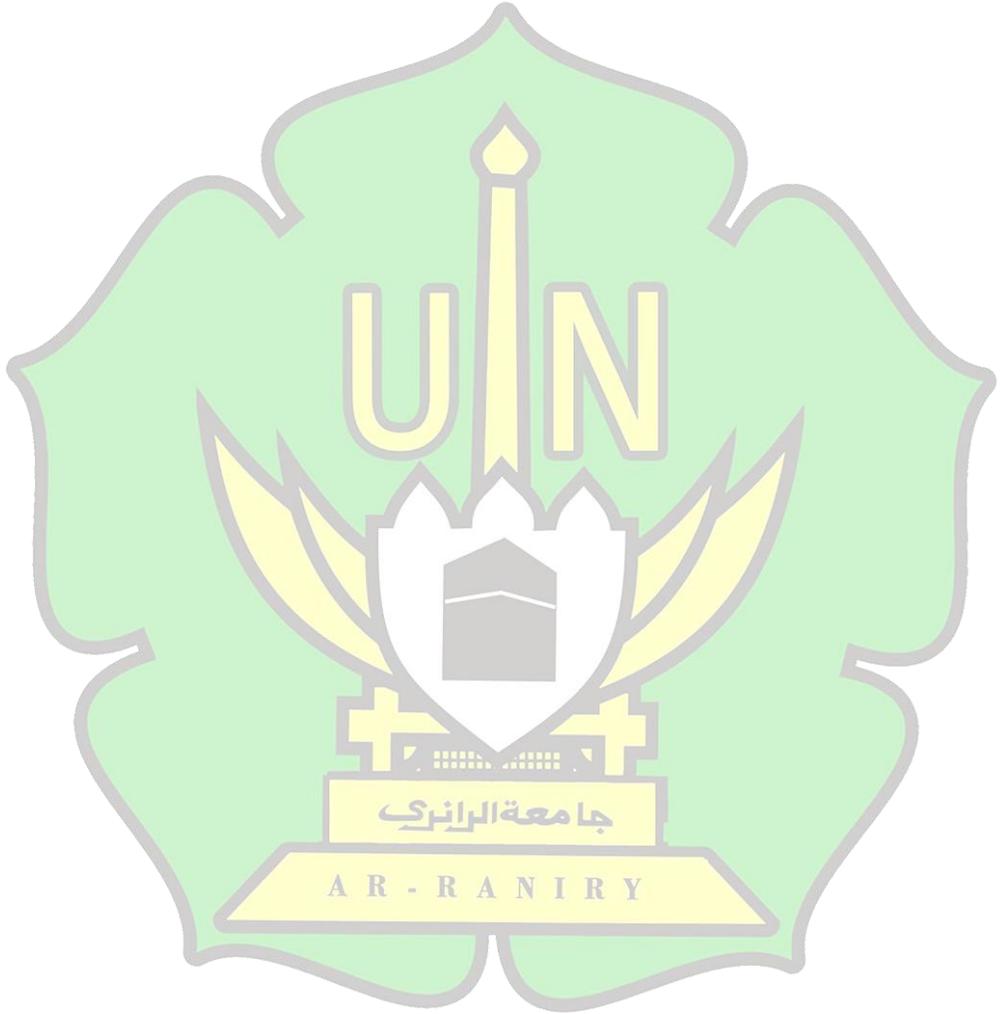
df=(n-k)	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$
1	6,314	12,706
2	2,920	4,303
3	2,353	3,182
4	2,132	2,776
5	2,015	2,571
6	1,943	2,447
7	1,895	2,365
8	1,860	2,306
9	1,833	2,262
10	1,812	2,228
11	1,796	2,201
12	1,782	2,179
13	1,771	2,160
14	1,761	2,145
15	1,753	2,131
16	1,746	2,120
17	1,740	2,110
18	1,734	2,101
19	1,729	2,093
20	1,725	2,086
21	1,721	2,080

22	1,717	2,074
23	1,714	2,069
24	1,711	2,064
25	1,708	2,060
26	1,706	2,056
27	1,703	2,052
28	1,701	2,048
29	1,699	2,045

### Lampiran 9. F-Tabel

$\alpha = 0,05$	$df_1 = (k-1)$							
$df_2 = (n - k - 1)$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161,448	199,500	215,707	224,583	230,162	233,986	236,768	238,883
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330	19,353	19,371
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	8,887	8,845
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950	4,876	4,818
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	3,787	3,726
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	3,500	3,438
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,230
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790	2,707	2,641
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741	2,657	2,591
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699	2,614	2,548
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661	2,577	2,510
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628	2,544	2,477
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599	2,514	2,447
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573	2,488	2,420
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549	2,464	2,397
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528	2,442	2,375
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508	2,423	2,355

25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490	2,405	2,337
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474	2,388	2,321
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459	2,373	2,305
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445	2,359	2,291
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432	2,346	2,278



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Maisanti  
NIM : 180604067  
Tempat / Tgl. Lahir : Aceh Besar, 05 Mei 2000  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Pulo Aceh  
No. Hp : 081377455075  
Email : [180604067@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180604067@student.ar-raniry.ac.id)

### Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 1 Pulo Aceh
2. SMP : SMP Negeri 1 Pulo Aceh
3. SMA : SMTI Banda Aceh
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : M. Ali  
Pekerjaan : Dagang  
Nama Ibu : Naumiati  
Pekerjaan : IRT  
Alamat Orang Tua : Pulo Aceh